

PEDOMAN PRAKTIS PENGHITUNGAN PDRB KABUPATEN/KOTA

PENGERTIAN DASAR

Buku 1

ISBN : 978-979-064-001-6
No. Publikasi/*Publication Number* : 07140.0804
Katalog BPS/*BPS Catalogue* : 1303023

Ukuran Buku/*Book Size* : 8.5 x 11 inch.
Jumlah Halaman/*Total Pages* : iii + 105 halaman/*pages*

Naskah/*Manuscript* :
Sub-Direktorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional/
Sub-Directorate of Regional Production Account Consolidation

Gambar Kulit/*Cover Design* :
Sub-Direktorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional/
Sub-Directorate of Regional Production Account Consolidation

Diterbitkan oleh/*Published by*:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia
BPS-Statistics Indonesia

Dicetak oleh/*Printed by*:
CV. NARIO SARI

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya/
May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR


Data PDRB provinsi-provinsi di Indonesia telah dihitung secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah menaruh perhatian besar terhadap pengembangan sistem data yang dilakukan oleh BPS untuk memantau perkembangan dan kemajuan daerah, khususnya dibidang ekonomi regional. Dengan otonomi daerah maka tuntutan akan tersedianya data statistik PDRB Kabupaten/Kota menjadi sangat dibutuhkan.


Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota yang lebih akurat dan dapat dibandingkan antar Kabupaten/Kota membutuhkan pedoman tentang pengertian dasar dan metodologi yang seragam, selain penggunaan data dasar yang konsisten.

Buku Pedoman Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota ini merupakan buku pegangan bagi penyusun PDRB, dan edisi ini merupakan revisi dari publikasi terdahulu yang berisi penjelasan mengenai pengertian dasar, konsep dan definisi, kegunaan PDRB dan metoda penghitungannya.

Disadari masih ada kelemahan baik dari segi materi maupun cara penyajian buku pedoman ini. Oleh karena itu saran dari semua pihak merupakan masukan yang berharga untuk penyempurnaan dan perbaikan dimasa mendatang. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2008
 DEPUTI BIDANG NERACA DAN
ANALISIS STATISTIK


DR. SLAMET SUTOMO, SE
NIP : 340004005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.	L
atar Belakang	1
1.2.	T
ujuan	2
1.3.	P
embahasan	3
BAB II KERANGKA DASAR EKONOMI REGIONAL	6
2.1. Siklus Kegiatan ekonomi.....	6
2.2. Sistem dan Perangkat Neraca Ekonomi Regional	8
BAB III KONSEP DAN DEFINISI	13
3.1. Konsep Domestik dan Regional	13
3.2. Agregat Produk Domestik Regional Bruto	15
3.3. Barang dan Jasa	18
3.4. Output	20
3.5. Biaya Antara	23
3.6. Nilai Tambah	25
3.7. Komponen Penggunaan	32
3.8. Klasifikasi Sektor	38
3.9. Susunan Produk Domestik Bruto	40
BAB IV. METODOLOGI	42
4.1. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	42
4.2. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	45
BAB V. PENYAJIAN	50
5.1. Tabel Pokok PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan.....	50

5.2. Tabel Turunan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan	52
BAB VI. ANALISA DAN KEGUNAAN DATA PDRB	58
6.1. Arti Analisa Data	58
6.2. Tujuan Analisa.....	58
6.3. Metode Statistik yang Digunakan	59
6.4. Ringkasan Data PDRB	59
6.5. Teknik Analisa	60
6.6. Beberapa Indikator Pokok Ekonomi Makro	61
6.7. Kegunaan Data PDRB	64
BAB VII. KETERBATASAN DAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PENGHITUNGAN	68
7.1. Keterbatasan	68
7.2. Masalah yang Dihadapi Dalam Penghitungan	70
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan bermacam-macam data statistik untuk dasar penentuan strategi dan kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa-masa yang lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang merupakan ukuran kuantitas mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap, dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Makin meningkatnya pembangunan baik untuk lingkup nasional maupun regional, mendorong masing-masing Daerah Tingkat I melakukan penghitungan pendapatan regionalnya. Penghitungan Pendapatan Regional di Indonesia dimulai pada tahun 1968 oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya diikuti oleh Sumatera Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi-Provinsi lainnya.

Perhatian terhadap perhitungan pendapatan regional ternyata semakin besar, sehingga pada bulan Agustus 1970 telah dibentuk Kelompok Penelitian Pendapatan Regional Indonesia (Regional Income Research Group - RIRG) yang bertujuan untuk membahas, menganalisa serta memperbandingkan hasil-hasil penelitian pendapatan regional. Dalam tahun 1972 Kelompok Penelitian Penghitungan Pendapatan Regional Indonesia bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri/Direktorat Jenderal PMD, mencoba melakukan penghitungan pendapatan wilayah pada 15 buah desa di Indonesia. Disusul kemudian dalam tahun 1974, kelompok ini membuat suatu perhitungan pendapatan regional dari 26 Provinsi di Indonesia yang didasarkan pada alokasi angka Pendapatan Nasional Indonesia meliputi seri tahun 1968-1972 dan dalam tahun 1976 melanjutkan usaha yang sama meliputi seri tahun 1968-1976. Pada saat ini seluruh Badan Pusat Statistik Provinsi di Indonesia telah melakukan penghitungan

Pendapatan Regional Provinsi-nya masing-masing. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap Provinsi di Indonesia secara rutin (tahunan) diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi.

Pemerintah Daerah menaruh perhatian besar dalam pengembangan sistem data untuk memonitor perkembangan kemajuan disegala bidang, khususnya dibidang ekonomi, baik untuk tingkat Provinsi maupun untuk wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Tekad pemerintah untuk memberikan otonomi penuh kepada Daerah Tingkat II sudah bulat dan akan segera dilaksanakan. Dengan demikian tuntutan akan tersedianya data statistik ekonomi makro seperti yang tertuang dalam penghitungan Pendapatan Regional Kabupaten/Kota sudah sangat mendesak.

1.2. Tujuan

Pembangunan yang pesat disegala bidang dan telah menjangkau seluruh pelosok tanah air memerlukan adanya data Statistik PDRB setiap tingkat wilayah administrasi untuk perencanaan pembangunan khususnya bidang ekonomi sekaligus evaluasi hasilnya. Pada Pelita V, atau tahap akhir PJPT I, permintaan akan data PDRB Kabupaten/Kota semakin meningkat. Badan Pusat Statistik pada saat ini sedang mempersiapkan tenaga penghitung PDRB Kabupaten/Kota beserta buku pedomannya. Kalaupun data PDRB beberapa Kabupaten/Kota tersedia, data tersebut umumnya adalah hasil penghitungan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Beberapa Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota juga telah mencoba melakukan penghitungan secara langsung PDRB wilayahnya. Kedua hasil penghitungan tersebut, dengan keterbatasan data yang tersedia serta kelemahan metodologi maupun cakupannya, masih perlu diperbaiki. Hal ini memerlukan tenaga terlatih dan menguasai konsepsi metodologi maupun praktek penghitungan PDRB baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Untuk menempatkan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota pada posisi yang memegang peranan dalam penyempurnaan dan pengembangan Statistik Pendapatan Regional, diperlukan tenaga yang handal dan terlatih mengenai PDRB tersedia dalam jumlah yang memadai di masing-masing wilayah. Maka proses alih teknologi dan ketrampilan bidang statistik ekonomi makro, utamanya mengenai PDRB baik dari Badan Pusat Statistik ke para Kepala Bidang Neraca Wilayah di Badan Pusat Statistik Provinsi, maupun dari para Kepala Bidang Neraca Wilayah di Badan Pusat Statistik Provinsi, ke para Kepala Seksi Neraca Wilayah di Kabupaten/Kota perlu dipercepat. Untuk mendukung program tersebut perlu disusun buku panduan penghitungan PDRB Kabupaten/Kota.

Pengalaman perkembangan penghitungan PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia secara konsepsional telah dimulai sejak terbitnya buku Pedoman Penghitungan Pendapatan Regional pada bulan Desember 1980. Buku tersebut terus disempurnakan dan dikembangkan melalui berbagai pertemuan dan diskusi pada pelatihan-pelatihan serta pengalaman praktek penghitungan PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, juga dengan memperhatikan kelengkapan tersedianya data dasar pada tingkat Provinsi.

Tujuan penyusunan buku Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota ini adalah untuk panduan bagi para penghitung PDRB Kabupaten/Kota dalam memahami ruang lingkup, konsep dan

definisi, metodologi secara komprehensif dan kegunaan serta keterbatasan sajian data PDRB, dilengkapi dengan contoh-contoh perhitungan dan lembar kerjanya secara rinci setiap sektor dan subsektor. Buku pedoman ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat dibedakan secara tegas antara uraian untuk mendukung pemahaman secara mendalam tentang konsepsi dan falsafah dasar mengenai PDRB, dengan uraian dan penjelasan yang berisi tata cara penghitungan sebagai buku panduan praktek pelaksanaan penghitungan PDRB Kabupaten/Kota. Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota terdiri dari dua buku yaitu Buku I berisi Pengertian Dasar dan Buku II berisi Tata Cara Penghitungan Menurut Lapangan Usaha.

Buku Pedoman praktis penghitungan PDRB Kabupaten/Kota semacam ini masih membuka kemungkinan untuk terus dilakukan penyempurnaannya berdasarkan masukan dari berbagai pihak, dari diskusi-diskusi dalam pelatihan serta dari pengalaman praktek penghitungan di lapangan menghadapi tantangan dan permasalahan pembangunan statistik ekonomi pada khususnya.

1.3. Pembahasan

Buku pedoman praktis ini disusun untuk dijadikan panduan bagi para penghitung PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia. Buku pedoman tersebut dituangkan kedalam dua jilid yang secara terpisah menurut uraian tentang: i) pengertian dasar dan ii) tata cara penghitungan menurut lapangan usaha.

Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota, Buku I ini menguraikan hal-hal yang bersifat prinsip dan falsafah yang sangat mendasar mengenai PDRB, mulai dari kerangka dasar ekonomi regional, konsepsi dan definisi sampai analisis dan kegunaannya. Buku I (satu) ini berisi uraian pengertian dasar PDRB yang dijabarkan secara rinci kedalam tujuh bab utama ditambah daftar kepustakaan, disusun secara sistematis sebagai berikut: Bab I, sebagai pendahuluan menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan. Bab II menguraikan kerangka dasar ekonomi Regional sebagai awal dari pemahaman PDRB secara komprehensif. Bab III menjelaskan konsep, definisi dan klasifikasi secara teoritis dan sangat mendasar untuk dapat melakukan penghitungan nilai tambah bruto menurut lapangan usaha maupun menurut komponen penggunaan PDRB melalui berbagai alternatif pendekatan. Bab IV menjelaskan tentang berbagai metodologi yang dapat diterapkan dalam penghitungan PDRB Kabupaten/Kota dengan berbagai asumsi dan kondisi data pokok dan data pelengkap yang tersedia untuk penghitungan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Bab V berisi penjelasan tentang sajian data ekonomi makro regional (Kabupaten/Kota) terutama tabel-tabel pokok dan tabel-tabel turunan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Bab VI menguraikan tentang pola analisis deskriptif ekonomi regional dari data PDRB sektoral maupun komponen penggunaannya (*expenditure*). Bab ini juga menjelaskan tentang kegunaan data PDRB. Bab VII menguraikan tentang berbagai masalah dan keterbatasan dalam penghitungan PDRB agar supaya para konsumen berhati-hati dalam mengambil kesimpulan dan menggunakan data PDRB secara tepat. Buku I (satu) ini ditutup dengan daftar kepustakaan.

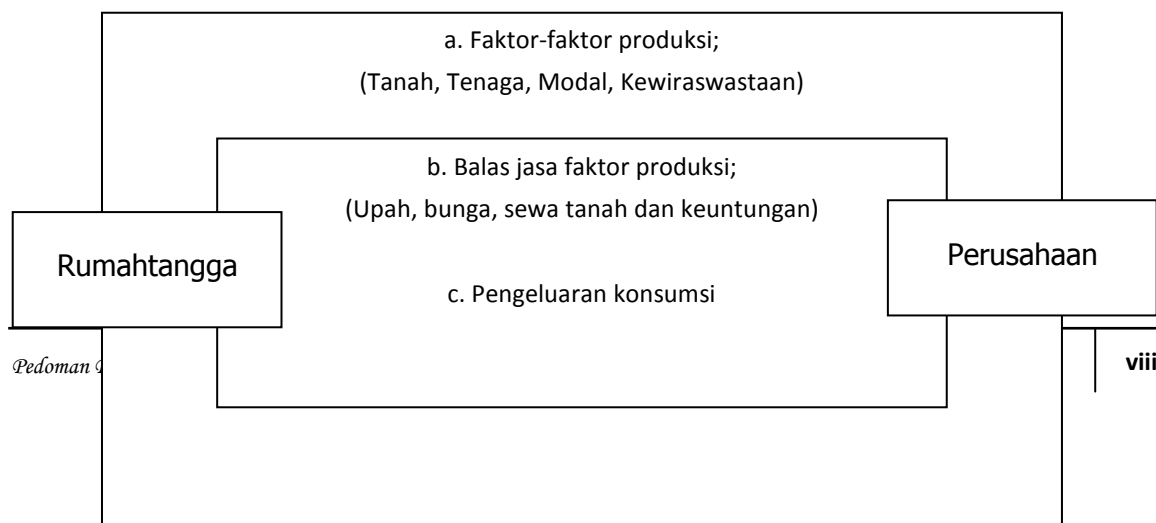
BAB II KERANGKA DASAR EKONOMI REGIONAL

Untuk dapat melaksanakan penghitungan PDRB sebagai sajian data statistik ekonomi makro di tingkat daerah, dan memahami arti dan kegunaan tabel-tabel pokok, tabel pelengkap dan tabel-tabel turunannya secara tepat, pada bab II ini diuraikan mengenai siklus kegiatan ekonomi sebagai prinsip dasar ekonomi makro yang mengkaitkan interaksi antara produsen dan konsumen melalui berbagai transaksi yang terjadi, baik mengenai arus barang dan jasa maupun faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam kegiatan ekonomi dalam suatu daerah. Disamping itu diuraikan pula sistem dan perangkat neraca ekonomi regional yang merupakan kerangka dasar berpijak untuk melaksanakan penghitungan PDRB.

2.1. Siklus Kegiatan Ekonomi

Apabila diperhatikan, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, secara sederhana dapat dibedakan dua kelompok besar yaitu: kelompok produsen dan kelompok konsumen. Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari kelompok konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan produsen dibeli oleh konsumen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kelompok konsumen memiliki faktor produksi; tanah, tenaga, modal dan kewiraswastaaan yang diberikan pada peusahaan dan menerima balas jasanya berupa sewa tanah, upah dan gaji, bunga modal dan keuntungan. Balas jasa yang diterima ini disebut nilai tambah atau pendapatan, yang selanjutnya digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa dari produsen untuk dikonsumsi. Transaksi dari kedua kelompok ini yang satu merupakan pemakai barang dan jasa, berkesinambungan sehingga membentuk siklus perekonomian.

Untuk melihat perputaran perekonomian yang sederhana, diumpamakan terjadi antara kelompok perusahaan dan kelompok rumahtangga di dalam suatu perekonomian yang tertutup atau di dalam suatu daerah yang tidak melaksanakan transaksi dengan daerah lain. Gambar di bawah ini menunjukkan transaksi yang terjadi antara rumahtangga dan perusahaan dalam suatu perekonomian tertutup sederhana.



- (Arus Uang)
- d. Barang dan jasa
(Arus Barang)

Keterangan:

- a) Menunjukkan penyediaan faktor produksi;
- b) Menunjukkan arus balas jasa faktor produksi;
- c) Menunjukkan arus uang;
- d) Menunjukkan arus barang dan jasa.

Gambar yang sederhana tersebut menunjukkan bahwa aliran barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan akan sama dengan aliran uang yang diterima oleh rumahtangga, dan juga sama dengan besarnya nilai uang yang dibelanjakan oleh rumahtangga. Di dalam kenyataan barang dan jasa yang digunakan baik untuk konsumsi maupun barang modal, tidak semua berasal dari dalam negeri tetapi sebagian dari luar negeri. Dan sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri tidak semuanya digunakan di dalam negeri tetapi sebagian digunakan di luar negeri, di mana hal ini akan dicerminkan dalam perekonomian terbuka. Dalam hal pendapatan regional pengertian luar negeri juga termasuk luar daerah. Untuk perekonomian yang sifatnya terbuka, perputaran ekonomi akan lebih rumit dibandingkan dengan perekonomian tertutup sederhana. Dengan melihat siklus ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Regional adalah sebagai berikut:

- a) Kalau ditinjau dari segi produksi, disebut Produk Regional, merupakan jumlah nilai tambah (produk) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu yang tertentu (satu tahun).
- b) Kalau ditinjau dari segi pendapatan, disebut Pendapatan Regional (Regional Income) merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu yang tertentu (satu tahun).
- c) Atau apabila ditinjau dari segi pengeluaran, disebut Pengeluaran Regional (Region Expenditure), merupakan jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumahtangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor neto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Dalam kenyataannya pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara atau daerah belum tentu akan dinikmati/digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut, dan begitupun sebaliknya ada pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut yang berasal dari daerah lainnya. Sehubungan dengan itu maka timbullah aliran pendapatan dari satu daerah ke daerah lainnya. Produktivitas suatu daerah dicerminkan oleh produk domestik, sedang tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sudut penggunaannya, setelah diperhitungkan aliran pendapatan yang keluar masuk daerah tersebut.

2.2. Sistem dan Perangkat Neraca Ekonomi Regional

Neraca Ekonomi Regional bertujuan memberikan suatu gambaran statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Secara lebih konkret dapat diketahui bahwa neraca ekonomi regional menyajikan suatu

ukuran kuantitatif yang dinyatakan dalam nilai uang, mengenai tingkat produksi, konsumsi, tabungan, investasi, ekspor, impor, nilai tambah dan agregat ekonomi makro lainnya untuk suatu daerah.

A. Sistem Neraca Ekonomi Regional

Neraca ekonomi regional merupakan suatu sistem penyediaan informasi ekonomi baik pada tingkat agregasi maupun pada unsur-unsur dan komponen-komponennya. Sistem ini memberikan suatu ringkasan kegiatan ekonomi dengan membedakan antara lain:

- a) bentuk perekonomian, kegiatan, misalnya produksi, konsumsi, akumulasi;
- b) sektor dan badan-badan atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan proses produksi, menciptakan pendapatan dan pengeluaran, serta melakukan pembentukan modal dan penyediaan dana; dan
- c) jenis-jenis transaksi seperti: penjualan dan pembelian barang dan jasa, hadiah, sumbangan, pajak-pajak dan bentuk transfer lainnya.

Neraca ekonomi regional memperkenalkan konsep-konsep dasar ekonomi makro dengan cara mengkonsolidasikan masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan walaupun data dasarnya diperoleh dari satuan (unit-unit) ekonomi kecil, misalnya; perusahaan, perseorangan dan rumah tangga. Data yang diperoleh dari unit-unit ekonomi kemudian diagregasikan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. Dengan neraca ekonomi regional diharapkan tingkah laku perekonomian yang menyangkut aspek produksi, pendapatan, konsumsi, tabungan, investasi, sumber dan penggunaan dana, perubahan stok, ekspor dan impor dapat diketahui. Dengan suatu analisis data dapat diperoleh hubungan-hubungan secara fungsional dari unsur-unsur dan komponen tersebut di atas, sehingga secara umum merupakan konsep ekonomi makro.

Dari segi analisis maka proses ekonomi biasanya disajikan sebagai suatu proses berputar (siklus kegiatan), yang ditandai antara lain dengan aspek-aspek penting seperti berikut ini:

- 1) Produksi barang dan jasa dengan bantuan input antara (biaya antara) dan input primer (biaya primer *minus* faktor produksi).
- 2) Penciptaan pendapatan dalam proses produksi, dan distribusinya ke berbagai faktor produksi primer, dan distribusi selanjutnya dari pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi tadi ke berbagai sektor ekonomi.
- 3) Pendistribusian kembali pendapatan antar sektor-sektor ekonomi (institusi) yang berbeda, dan pengeluaran pendapatan untuk barang konsumsi maupun untuk keperluan lain.
- 4) Tabungan yang terjadi dalam ekonomi (oleh berbagai sektor yang berbeda) maupun investasi yang dilakukan, serta hubungan antara kedua komponen tersebut.
- 5) Hubungan eksternal antara ekonomi domestik dengan luar negeri dan luar daerah.

Data mengenai berbagai aspek dari proses kegiatan ekonomi seperti yang disebutkan di atas, dapat diperoleh dalam berbagai bentuk neraca yang berbeda, yang secara keseluruhan membentuk sistem neraca ekonomi nasional atau regional. Di antara berbagai neraca yang paling sering dijumpai (sebagai neraca-neraca pokok) adalah sebagai berikut:

(1) Neraca Produksi

Neraca ini memberikan gambaran secara rinci mengenai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu unit usaha, dalam suatu daerah, dan berbagai input yang dipakai dalam proses produksi serta nilai tambah yang timbul beserta komposisinya.

(2) Neraca Pendapatan dan Pengeluaran (Neraca Konsumsi)

Neraca ini menggambarkan besarnya dan komposisi dari pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan atas pendapatan tadi. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran pada neraca ini adalah tabungan.

(3) Neraca Transaksi Modal atau Neraca Tabungan dan Investasi (lebih dikenal sebagai Neraca Akumulasi)

Neraca ini memberikan gambaran secara rinci mengenai besarnya dan komposisinya dari investasi (pembentukan modal) serta sumber pembiayaannya seperti tabungan, pinjaman dan lain-lain.

(4) Neraca Transaksi Eksternal (Luar Negeri/Daerah)

Neraca ini memberikan gambaran secara rinci mengenai ekspor, impor dan transaksi-transaksi yang terjadi antara perekonomian domestik (region) dengan luar negeri atau luar daerah, dilihat dari sudut luar negeri/daerah.

B. Perangkat Neraca Ekonomi Regional

Selain dari empat neraca pokok seperti tersebut diatas sebetulnya masih banyak bentuk dan jenis neraca-neraca lainnya yang merupakan perangkat neraca ekonomi terintegrasi. Dalam sistem neraca ekonomi nasional yang terintegrasi, perangkat lengkap neraca ekonomi idealnya meliputi 13 jenis neraca termasuk diantaranya tabel input-output, neraca arus dana, neraca pembayaran luar negeri, neraca kekayaan modal dan neraca akhir. Pada tingkat ekonomi regional (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang bersifat terbuka, transaksi-transaksi non-riil (khususnya moneter) sangat sulit diperoleh datanya pada saat ini, sehingga walaupun secara teoritis dapat disusun neraca-neraca tersebut untuk tingkat regional, tentu masih memerlukan waktu yang sangat lama sampai tersedia secara sistematis data yang diperlukan. Kecuali tabel input-output (I-O) yang tidak lain merupakan neraca komoditi, himpunan transaksi riil komoditi antar sektor produksi, dapat disusun untuk tingkat daerah.

Neraca Komoditi menyajikan rincian transaksi (interaksi) antara kelompok komoditi (barang dan jasa) atau kegiatan yang kurang lebih homogen, berkenaan dengan penyediaan asalnya (produksi domestik dan impor) dan penggunaannya (permintaan antara, konsumsi akhir, pembentukan modal dan ekspor). Format lain dari neraca komoditi lebih dikenal dalam bentuk matriks dengan sebutan Tabel Input-Output yang juga sangat berguna untuk analisis pengganda (multiplier) dan analisis dampak.

Sistem ekonomi modern bekerja atas dasar network of transaction. Untuk mengungkapkan keterkaitan berbagai sektor/institusi dalam masyarakat sebagai pelaku ekonomi (transaktor) yang melakukan banyak ragam dan corak kegiatan (transaksi) serta terjadi secara simultan pada suatu periode waktu tertentu, maka perlu adanya landasan model serta sistem dan perangkat neraca ekonomi regional yang terintegrasi. Neraca Ekonomi Regional dapat disajikan dalam berbagai cara, yang umum dikenal adalah bentuk-bentuk: a) Neraca T (double-entry accounts), b) Matriks, dan c) Tabel.

Neraca dalam bentuk T merupakan neraca yang biasa dilakukan dalam pembukuan perusahaan, disebut dengan double-entry statement (T accounts) yang merupakan keseimbangan nilai antara dua sisi. Sisi kanan dari neraca menunjukkan pendapatan/penerimaan (incoming/receipts), sedangkan sisi kiri menunjukkan pengeluaran/pembayaran (outgoing/disbursements). Setiap transaksi muncul dua kali, yaitu sebagai pemasukan di suatu neraca dan sebagai pengeluaran di neraca lainnya. Neraca dalam bentuk matriks merupakan isian dari sel-sel berderet baris atau kolom dalam bentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Menurut kesepakatan, isian sel-sel menurut baris menunjukkan pemasukan/ penerimaan (incoming - output) dan isian sel-sel menurut kolom menunjukkan pengeluaran/ pembayaran (outgoings - input).

Neraca dalam bentuk tabel merupakan sajian khusus dari unsur atau komponen tertentu dari suatu neraca, untuk melihat perkembangan dalam deret waktu dari rincian sektor- sektor terjadinya pendapatan (supply) dan dari rincian komponen penggunaan nilai-nilai barang dan jasa akhir (demand) dari ekonomi makro nasional atau regional. Bentuk sajian ini seperti lazimnya terdapat pada publikasi PDRB, berupa tabel-tabel pokok sektoral dan penggunaan.

C. Format Neraca-neraca Pokok

Adapun format keempat neraca pokok sebagaimana disebutkan diatas disajikan dalam bentuk T accounts seperti pada gambar-gambar berikut :

(i) NERACA PRODUKSI

Pengeluaran/Pembayaran	Pendapatan/Penerimaan
1. Input antara	1. Output antara
2. Impor barang dan jasa	2. Konsumsi akhir
3. Upah dan gaji	3. Investasi (barang modal tetap dan stok
4. Surplus usaha (neto)	4. Ekspor barang dan jasa
5. Penyusutan	
6. Pajak tak langsung (neto)	
JUMLAH	JUMLAH

(ii) NERACA PENDAPATAN & PENGELUARAN

Pengeluaran/Pembayaran	Pendapatan/Penerimaan
1. Pengeluaran konsumsi akhir	1. Pendapatan faktor dari produksi domestik
2. Tabungan	2. Pendapatan faktor dari luar negeri
	3. Pajak tak langsung (neto)
	4. Transfer lainnya dari luar negeri (neto)
JUMLAH	JUMLAH

(iii) NERACA AKUMULASI

Pengeluaran/Pembayaran	Pendapatan/Penerimaan
1. a. Investasi barang modal tetap; b. Investasi perubahan stok	1. Tabungan 2. Penyusutan 3. Transfer modal dari luar negeri (neto) 4. Pinjaman dari L.N (neto) (net, borrowing)
JUMLAH	JUMLAH

(iv) NERACA EKSTERNAL (Luar Negeri/Luar Daerah)

Pengeluaran/Pembayaran	Pendapatan/Penerimaan
1. Ekspor barang dan jasa 2. Pendapatan faktor dari luar 3. Transfer lainnya dari luar negeri (neto)	1. Impor barang dan jasa 2. Surplus perekonomian negeri (neto) 3. Transfer lainnya dari luar neger (neto)
JUMLAH	JUMLAH

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui neraca ekonominya. Seperti telah diterangkan sebelumnya perhitungan-perhitungan ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dalam bab ini akan diuraikan konsep dan definisi yang digunakan untuk perhitungan pendapatan regional. Konsep dan definisi menjadi amat penting untuk memahami lebih lanjut mengenai data yang tersedia. Arti, wujud fisik, karakteristik, batasan dan sifat kegiatan tentang eksistensi, perubahan dan perpindahan suatu barang dan jasa harus tercermin jelas dalam konsep dan definisi. Definisi yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda pula. Perlu diingat bahwa konsep dan definisi yang terdapat dalam buku ini pada dasarnya untuk tujuan penyusunan neraca regional.

3.1. Konsep Domestik dan Regional

Wilayah perekonomian yang akan diselidiki untuk membuat suatu perhitungan pendapatan nasional adalah suatu negara, sedang untuk membuat suatu perhitungan pendapatan regional adalah suatu daerah dari suatu negara. Pengertian daerah disini dapat merupakan Daerah Tingkat I (Provinsi) atau Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), dan Desa. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi dalam wilayah domestik suatu daerah, dan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat (resident) dari daerah tersebut.

a. Produk Domestik dan Produk Regional

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Yang dimaksud dengan wilayah domestik suatu daerah adalah meliputi daratan dan lautan yang berada di dalam batas-batas geografis daerah tersebut. Wilayah administratif suatu Pemerintahan dengan Tingkat I, Tingkat II dan Desa merupakan wilayah domestik Provinsi, kabupaten/Kota dan desa.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar

negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Yang dimaksud dengan produk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/negeri dikurang dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah/negeri tersebut. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah.

b. Penduduk

Penduduk suatu daerah adalah individu-individu atau anggota rumahtangga yang bertempat tinggal tetap di wilayah domestik daerah tersebut, kecuali:

- (1) Wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) daerah lain yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan yang bertujuan untuk bertamasya atau berlibur, berobat, beribadah, kunjungan keluarga, pertandingan olahraga nasional/internasional dan konferensi-konferensi atau pertemuan lainnya, dan kunjungan dalam rangka belajar atau melakukan penelitian.
- (2) Awak kapal laut dan pesawat udara luar negeri/luar daerah yang kapalnya sedang masuk dok atau singgah di daerah tersebut.
- (3) Pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 6 bulan; pegawai perusahaan asing dan pegawai perusahaan daerah lainnya yang berada di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan, misalnya untuk tujuan memasang jembatan atau peralatan yang dibeli dari mereka.
- (4) Pekerja musiman yang berada dan bekerja di wilayah domestik daerah tersebut, yang bertujuan sebagai pegawai musiman saja.
- (5) Anggota Korps Diplomatik, konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah tersebut.
- (6) Pegawai badan internasional/nasional yang bukan penduduk daerah tersebut yang melakukan misi kurang dari 6 bulan.

Orang-orang yang tersebut di atas dianggap sebagai penduduk dari negara atau daerah di mana dia biasanya bertempat tinggal.

3.2. Agregat Produk Domestik Regional Bruto

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

c. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar di atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga. Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hinggakalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor.

d. Pendapatan Regional

Dari konsep-konsep yang diterangkan di atas dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor itu sebenarnya merupakan

jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi.

Sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menambahkan modalnya di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan tadi akan mengalir ke dalam daerah tersebut, dan menjadi pendapatan dari pemilik modal tadi. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam tadi, maka hasilnya akan merupakan Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional.

e. Pendapatan Regional Perkapita

Bila Pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan perkapita.

f. Ringkasan Agregat PDRB

Dari apa yang diuraikan di atas, maka konsep-konsep yang dipakai dalam Pendapatan Regional dapat diurutkan sebagai berikut:

- (1) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (GRDP at market prices), minus: penyusutan, akan sama dengan:
- (2) Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar (NRDP at market prices), minus: pajak tidak langsung neto, akan sama dengan:
- (3) Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor (NRDP at factor prices), plus: pendapatan neto yang mengalir dari ke daerah lain/luar negeri, akan sama dengan:
- (4) Pendapatan Regional (Regional Income)

- (5) Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi Pendapatan Regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

3.3. Barang dan Jasa

Barang adalah produksi berbentuk fisik yang dapat diraba dan dilihat, sedang jasa adalah produksi yang tidak dapat diraba dan dilihat. Barang dan jasa diproduksi melalui suatu proses produksi atas partisipasi faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal dan wiraswasta. Proses produksi didefinisikan sebagai suatu proses yang menciptakan atau menambah nilai, kegunaan atau manfaat baru dari suatu barang dan jasa.

Pada dasarnya barang dan jasa digunakan sebagai bahan dan alat, baik oleh rumah tangga maupun produsen. Disebut sebagai bahan apabila habis dipakai sekali selama proses produksi dan sebagai alat apabila dipakai berulang-ulang dalam proses produksi. Semua jasa pada umumnya habis sekali dipakai dalam proses produksi maupun konsumsi. Barang yang diproduksi/digunakan dapat dibedakan antara barang tahan lama dan barang tidak tahan lama.

Barang dan jasa menurut penggunaannya dibedakan atas:

- (1) Barang dan jasa untuk memenuhi permintaan antara, yaitu barang dan jasa yang digunakan sebagai biaya antara di dalam proses produksi;
- (2) Barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir, yaitu barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen akhir. Barang dan jasa ini sebagian digunakan sebagai alat di dalam proses produksi, dan dikategorikan sebagai barang modal.

Barang dan jasa menurut eksistensinya dibedakan atas:

- (1) Produk utama, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi dengan nilai yang paling tinggi, atau volume fisiknya atau waktu pengerjaannya paling besar.
- (2) Produk sekunder, adalah barang dan jasa yang dihasilkan selain dari produk utama. Produk sekunder terdiri dari:
 - (a) Produk ikutan, adalah barang dan jasa yang dihasilkan bersama-sama dengan produk utama atas penggunaan teknologi tunggal. Contohnya, beras adalah produk utama dan dedak merupakan produk ikutan.
 - (b) Produk sampingan, adalah barang dan jasa yang dihasilkan sejalan dengan produk utama tapi dari penggunaan teknologi yang berbeda. Contohnya, semen adalah produk utama dan kantong semen adalah produk sampingan.

a. Produsen Barang dan Jasa

Produsen dibedakan menurut:

- (1) Perusahaan yang bergerak diberbagai lapangan usaha yang kegiatannya dibelanjai oleh hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkan. Barang dan jasa tersebut dinilai atas dasar harga

pasar yang umumnya meliputi biaya yang digunakan di dalam proses produksi termasuk keuntungan normal. Yang termasuk ke dalam perusahaan di sini mencakup semua perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

- (2) Produsen jasa pemerintah yang menyediakan jasa yang biasanya tidak diproduksi oleh unit lain, dan tujuannya mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan umum di bidang ekonomi dan sosial. Sebagian besar dari jasa yang diproduksi digunakan untuk konsumsi akhir pemerintah sendiri.
- (3) Lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba) adalah produsen yang menyediakan jasa kepada rumahtangga atas dasar tidak mencari keuntungan dan tidak sepenuhnya dibiayai atau dikontrol oleh pemerintah.

b. Pemakai Barang dan Jasa

Pemakai barang dan jasa terdiri dari perusahaan, pemerintah, lembaga swasta nirlaba, luar negeri dan rumah tangga. Barang dan jasa digunakan untuk konsumsi antara dan konsumsi akhir. Perusahaan, pemerintah, lembaga swasta yang tidak mencari untung dan pemakai di luar negeri menggunakan barang dan jasa untuk konsumsi antara dan konsumsi akhir. Sedangkan rumahtangga hanya memakai barang dan jasa untuk konsumsi akhir.

c. Penilaian

Barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi dinilai atas dasar harga produsen. Yang dimaksud dengan harga produsen adalah suatu tingkat harga yang diterima oleh produsen yang terjadi pada transaksi pertama. Harga ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi barang dan jasa termasuk keuntungan normal dan pajak tidak langsung neto. Harga produsen tidak termasuk margin perdagangan dan biaya pengangkutan karena margin perdagangan merupakan output dari kegiatan perdagangan penyaluran, dan biaya pengangkutan merupakan output kegiatan pengangkutan yang menghubungkan produsen dengan konsumen.

Para pemakai dalam menilai barang dan jasa yang digunakan adalah atas dasar harga pembeli, yakni harga barang dan jasa tersebut sampai di tempat pembeli. Dalam harga pembeli ini termasuk margin perdagangan dan biaya pengangkutan yang dilakukan oleh pihak lain, dan tidak termasuk biaya pengangkutan yang dilakukan sendiri oleh pembeli. Dalam hal produksi yang berbentuk jasa, harga produsen sama dengan harga pembeli karena jasa diproduksi dan langsung dikonsumsi pada saat yang sama.

3.4. Output

3.4.1. Cakupan Output

a. Perusahaan

Output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi baik produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. Pada umumnya merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya. Barang dan jasa yang diproduksi selama suatu periode tertentu sebagian besar biasanya dijual pada periode yang sama, juga termasuk barang dan jasa yang dibuat untuk diberikan kepada pegawainya sendiri. Sisanya merupakan stok produsen dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi. Barang setengah jadi meliputi barang yang masih dalam proses pembuatan atau perakitan.

Barang setengah jadi sektor konstruksi termasuk dalam output barang jadi sektor tersebut dan merupakan pembentukan modal tetap bruto. Pertambahan nilai dari kayu dan tanaman yang masih tumbuh tidak termasuk dalam perhitungan output, karena belum dianggap sebagai komoditi. Output lapangan usaha yang memproduksi barang untuk tujuan dipasarkan selama suatu periode tertentu, biasanya tidak sama dengan penerimaan penjualan pada periode tersebut. Barang yang dijual pada suatu periode sebagian diperoleh dari stok produksi periode yang lalu dan sebaliknya produksi periode sekarang tidak seluruhnya terjual pada periode yang sama, akan tetapi sebagian merupakan stok untuk dijual pada periode selanjutnya.

Output perusahaan mencakup juga:

- (1) Barang sisa. Yang dimaksud dengan barang sisa adalah barang yang sekaligus dihasilkan bersama-sama dengan produk utamanya misalnya sisa- sisa guntingan kaleng, plastik dan sebagainya.
- (2) Margin penjualan barang bekas. Yang dimaksud dengan barang bekas adalah barang yang sudah pernah digunakan sebagai konsumsi di wilayah domestik. Untuk penjualan barang modal bekas, nilai yang dimaksudkan ke dalam perhitungan output adalah selisih nilai penjualan dengan nilai buku barang tersebut. Yang dimaksud dengan nilai buku adalah nilai barang tersebut setelah disusutkan.
- (3) Margin perdagangan dan biaya lainnya dalam pemindahan hak atas tanah, hak usaha, hak sewa, hak paten dan sebagainya.
- (4) Bunga yang termasuk di dalam nilai penjualan secara kredit, apabila tidak bisa dipisahkan.
- (5) Imputasi biaya atas pelayanan bank dan lembaga keuangan lainnya. Imputasi biaya pelayanan (imputed service charges) bank merupakan selisih bunga yang diterima dikurangi dengan bunga yang dibayar.
- (6) Imputasi sewa untuk bangunan tempat tinggal milik sendiri. Sewa tanah pertanian dan tanah untuk penggunaan lainnya, tidak termasuk dalam output akan tetapi dipisahkan sebagai pendapatan atas kepemilikan (property income). Bilamana sulit untuk memisah-kan sewa tanah dengan sewa bangunan di mana dalam hal pembayarannya tergabung, maka ditentukan sebagai sewa yang mempunyai proporsi paling besar.
- (7) Barang dan jasa yang diproduksi untuk digunakan sendiri. Barang dan jasa ini meliputi barang dan jasa yang diproduksi untuk digunakan sendiri baik untuk konsumsi maupun pembentukan modal.

b. Produsen jasa pemerintah

Output dari produsen jasa pemerintah adalah sama dengan total pengeluaran untuk menghasilkan jasa tersebut yaitu merupakan jumlah dari belanja barang & jasa (biaya antara), upah dan gaji pegawai serta penyusutan barang modal pemerintah. Hampir seluruh output pemerintah dikonsumsi oleh pemerintah sendiri.

c. Lembaga swasta yang tidak mencari untung

Output dari lembaga swasta nirlaba yang melayani rumah tangga adalah sama dengan jumlah pengeluaran untuk menghasilkan jasa tersebut yaitu terdiri dari biaya antara, pembayaran upah dan gaji, penyusutan serta pajak tak langsung (kalau ada). Sebagian terbesar output dari lembaga ini dikonsumsi oleh lembaga itu sendiri.

3.4.2. Waktu Pencatatan Output

Pencatatan output komoditi, pada dasarnya dilakukan pada waktu barang dan jasa tersebut diproduksi. Dalam hal perdagangan penyaluran dicatat pada waktu barang-barang dijual dan untuk jasa dicatat pada waktu digunakan.

3.4.3. Penilaian Output

a. Output yang dipasarkan

Output komoditi dinilai atas dasar harga produsen. Harga produsen adalah nilai dasar output pada saat meninggalkan perusahaan yang memproduksinya. Biaya pengangkutan dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan, pergudangan dan biaya penyaluran lainnya yang diadakan sebelum barang tersebut meninggalkan produsen termasuk di dalam harga produsen. Biaya-biaya transpor, pergudangan dan lain-lain yang dibayar kepada perusahaan lain untuk menyampaikan barang tersebut ketangan pembeli setelah barang-barang tersebut meninggalkan produsen, tidak termasuk di dalam harga produsen. Biaya pemasangan dan instalasi alat-alat berat seperti mesin-mesin dan peralatan lainnya, termasuk di dalam nilai produksi atas dasar harga produsen. Harga produsen dari output berupa jasa adalah sama dengan nilai yang dibayarkan oleh pembeli jasa tersebut. Output atas dasar harga produsen dari perdagangan sama dengan nilai penjualan barang dikurangi nilai pembelian barang-barang tersebut.

Harga produsen didasarkan atas harga jual barang secara tunai, setelah potongan harga dan potongan-potongan lainnya. Biaya yang dibebankan kepada pembeli atas keterlambatan pembayarannya tidak termasuk di dalam nilai output. Dalam harga produsen termasuk pajak tidak langsung yang dikenakan pemerintah atas penjualan atau produksi barang-barang tersebut.

b. Output yang tidak dipasarkan

Output dari komoditi yang diproduksi untuk konsumsi sendiri, sejauh mungkin dinilai atas dasar nilai produsen komoditi yang sejenis dipasarkan. Bilamana produsen menjual sebagian dari komoditi yang dihasilkan dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri, harga produsen dari penjualan komoditi di pasar mungkin termasuk biaya transpor, jasa distribusi yang dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Pada prinsipnya unsur-unsur tersebut harus dikeluarkan dari nilai barang yang dikonsumsi sendiri, tetapi di dalam praktek hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan. Apabila produsen sama sekali tidak menjual produksinya maka harga yang digunakan adalah harga yang berlaku di daerah tersebut untuk jenis barang yang sama. Biasanya harga yang tersedia adalah harga eceran, sehingga margin perdagangan dan biaya transpor harus dikeluarkan. Imputasi sewa rumah milik sendiri pada dasarnya disamakan dengan sewa rumah yang sejenis atas dasar harga di pasar. Bila informasi sewa rumah atas harga pasaran tidak tersedia, imputasi sewa harus diperkirakan atas dasar biaya pemeliharaan dan perbaikan, bunga hipotek yang dibayar, penyusutan dan imputasi bunga atas modal sendiri yang ditanam untuk rumah tersebut.

Barang modal yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri seharusnya dinilai atas dasar harga produsen dari barang yang sejenisnya yang dijual di pasar. Akan tetapi dijumpai kesukaran untuk mendapatkan harga pasar bagi barang yang sama. Dalam hal pembangunan yang dilakukan secara gotong royong, misalnya pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain penilaiannya atas dasar biaya bahan-bahan dan imputasi upah dari tenaga yang digunakan.

3.5. Biaya Antara

Biaya antara terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Barang tidak tahan lama adalah barang yang mempunyai suatu perkiraan umur penggunaan kurang dari satu tahun. Dalam praktek sering timbul masalah di dalam membedakan biaya antara disatu pihak, dengan balas jasa pegawai, pengeluaran konsumsi rumahtangga atau pembentukan modal tetap bruto di lain pihak. Sebagai contoh, suatu perusahaan sering mencatat barang dan jasa yang diberikan kepada pegawai, sebagai biaya antara. Seharusnya, pengeluaran ini dimasukkan di dalam balas jasa pegawai.

Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban berdasarkan perjanjian, diperlakukan sebagai biaya antara. Sebagai contoh, pembelian peralatan kerja buruh-buruh tambang seperti lampu dan bahan peledak atau peralatan kerja buruh tani atas dasar suatu kontrak, diperlakukan sebagai biaya antara. Pengeluaran pegawai ke dan dari tempat bekerja dimasukkan sebagai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Perlakuan ini dipakai karena pengeluaran tersebut sepenuhnya merupakan keputusan yang dilakukan oleh pegawai. Penggantian uang perjalanan, makan dan sejenisnya yang diadakan oleh pegawai dalam hubungannya untuk melaksanakan tugas, diperlakukan sebagai biaya antara. Pengeluaran perusahaan untuk jasa kesehatan, obat-obatan dan rekreasi untuk pegawainya pada umumnya diperlakukan sebagai biaya antara, karena pengeluaran ini adalah untuk kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pegawai secara individu.

Kesulitan lain dalam praktek mungkin ditemukan dalam membedakan antara perbaikan kecil yang dimasukkan sebagai biaya antara, dengan perbaikan besar yang dimasukkan sebagai pembentukan barang modal tetap. Sebagai suatu pedoman umum, perbaikan kecil mencakup pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan dan penggantian suku cadang barang modal tetap yang sudah aus, sedang perbaikan besar mencakup pekerjaan yang menambah umur penggunaan suatu barang modal tetap atau meningkatkan produktivitasnya. Sebagai contoh, penggantian suatu sistem saluran air dari suatu bangunan tempat tinggal adalah merupakan perbaikan besar, sedang penggantian genteng adalah sebagai perbaikan kecil.

Pengeluaran atas perbaikan kecil dan pemeliharaan bangunan tempat tinggal yang disewa dimasukkan sebagai biaya antara bila dibayar oleh pemilik, dan sebagai pengeluaran konsumsi rumahtangga bila dibayar oleh penyewa. Penggunaan bangunan tempat tinggal oleh pembelinya dianggap menjadi suatu lapangan usaha sebagai bagian dari sektor Sewa Rumah. Pengeluaran untuk perbaikan kecil dan pemeliharaan bangunan tempat tinggal tersebut dimasukkan sebagai biaya antara. Perbaikan besar maupun perbaikan kecil mobil yang digunakan bukan untuk tujuan usaha dimasukkan di dalam pengeluaran konsumsi rumahtangga. Bila mobil tersebut digunakan untuk tujuan usaha dan juga untuk konsumsi rumahtangga, pengeluaran atas perbaikan kecil dan pemeliharaan harus dialokasikan sebagai biaya antara dan pengeluaran konsumsi rumahtangga.

Seluruh pengeluaran rutin perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan harus dimasukkan sebagai biaya antara. Akan tetapi, pengeluaran untuk pembukaan tanah, pekerjaan irigasi, perluasan tempat dan penggalian pertambangan, penanaman dan perusahaan baru dari tanaman keras, dimasukkan sebagai pembentukan modal tetap.

Pengeluaran untuk riset, pengembangan dan eksplorasi untuk tujuan khusus perusahaan, seperti pencarian barang-barang tambang, pengembangan komoditi-komoditi baru atau meningkatkan proses

produksi, atau untuk tujuan akhir yang lebih umum seperti riset dasar ilmiah, dimasukkan sebagai biaya antara walaupun pengeluaran ini merupakan pembentukan modal dalam perusahaan. Alasannya adalah bahwa pengeluaran tersebut belum pasti memberikan manfaat di masa yang akan datang dan dikhawatirkan akan timbul masalah penilaian dan penyusutan bila pengeluaran tersebut dimasukkan sebagai pembentukan modal tetap. Pengeluaran untuk iklan, riset pemasaran dan hubungan masyarakat, juga diperlakukan sebagai biaya antara dan bukan sebagai pembentukan modal.

Penilaian dan waktu pencatatan komoditi yang digunakan sebagai biaya antara, pada prinsipnya adalah atas dasar harga pembeli, pada saat barang tersebut digunakan.

3.6. Nilai Tambah

Nilai tambah bruto adalah merupakan produk dari proses produksi, yang terdiri dari komponen (a) pendapatan faktor, (b) penyusutan barang modal tetap, (c) pajak tak langsung neto, sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari nilai tambah bruto maka akan diperoleh nilai tambah neto.

3.6.1. Pendapatan Faktor

Pendapatan faktor adalah merupakan nilai tambah produsen atas penggunaan faktor-faktor produksi dalam proses produksi, yang terdiri dari unsur-unsur:

- (1) Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai
- (2) Sewa tanah sebagai balas jasa tanah
- (3) Bunga sebagai balas jasa modal
- (4) Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan.

Faktor pendapatan yang ditimbulkan oleh produsen komoditi meliputi seluruh unsur-unsur pendapatan faktor tersebut, sedang yang ditimbulkan oleh produsen barang dan jasa lainnya hanya terdiri dari unsur upah dan gaji. Dalam hal produsen komoditi, untuk perusahaan berbadan hukum unsur-unsur pendapatan faktor tersebut dapat dipisahkan; sedang untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum unsur-unsur pendapatan faktor tersebut sulit dipisahkan karena pada umumnya faktor-faktor produksi yang digunakan dimiliki sendiri. Dengan demikian, maka unsur-unsur pendapatan faktor diperinci menjadi:

- (1) Balas jasa pegawai
- (2) Pendapatan dari perusahaan tidak berbadan hukum
- (3) Pendapatan sewa tanah dan kepemilikan
- (4) Bunga neto
- (5) Keuntungan perusahaan berbadan hukum.

Unsur-unsur pendapatan faktor selain dari balas jasa pegawai biasanya dikelompokkan sebagai surplus usaha.

a. Balas Jasa Pegawai

Pegawai adalah semua orang yang ikut serta dalam kegiatan perusahaan berbadan hukum baik swasta maupun pemerintah, dan semua orang yang dibayar dalam kegiatan perusahaan tidak berbadan hukum. Definisi ini berbeda dengan definisi yang digunakan ILO (***International Labour Organization***) di mana pekerja keluarga yang tidak dibayar juga termasuk sebagai pegawai.

Pekerja yang juga sebagai pemilik untuk segala jenis usaha, apakah profesional atau bukan, tidak diperlakukan sebagai pegawai. Pendapatan dari pekerja pemilik dimasukkan sebagai surplus usaha dari perusahaannya. Pekerja koperasi diperlakukan sebagai pekerja pemilik dan bukan sebagai pegawai bila upah dan gajinya tergantung atas hasil usaha dari koperasi tersebut. Masalah batasan ini mungkin timbul dalam pengelompokan orang yang bekerja sebagian atas dasar kontrak dan sebagian lagi atas dasar upah dan gaji, mungkin juga ini timbul dalam hal anggota koperasi yang sebagian dibayar tetap dan sebagian atas dasar pembagian keuntungan. Bilamana upah dan gaji merupakan bagian dari penerimaan pendapatannya, orang tersebut harus diperlakukan sebagai pegawai; bila sebaliknya maka diperlakukan sebagai pekerja pemilik. Pekerja perwakilan perusahaan yang menerima sebagian besar pendapatannya dalam bentuk upah dan gaji harus dimasukkan sebagai pegawai.

Balas jasa pegawai terdiri dari:

- (1) Upah dan gaji dalam bentuk uang maupun barang
- (2) Iuran dana jaminan sosial dan dana kesejahteraan pegawai
- (3) Iuran dana pensiun, tunjangan keluarga, asuransi kesehatan kecelakaan dan lainnya, asuransi jiwa dan sejenisnya untuk keperluan pegawai.

Upah dan gaji merupakan unsur utama dari balas jasa pegawai. Seluruh pembayaran yang diterima pegawai secara langsung sehubungan dengan pekerjaannya, baik dalam bentuk uang maupun barang, dimasukkan sebagai upah dan gaji, sebelum dipotong iuran jaminan sosial dan sejenisnya, pajak upah dan sebagainya. Komisi agen yang merupakan pegawai perusahaan, tip untuk pelayan dan sopir, bonus, dana biaya hidup dan tunjangan kerugian atau kemahalan, pembayaran selama cuti, berlibur, sakit atau lain-lain, bila dibayar langsung oleh perusahaan, dimasukkan sebagai upah dan gaji. Juga honorarium anggota dewan komisaris dimasukkan sebagai upah dan gaji. Upah dan gaji dalam bentuk barang mencakup nilai barang dan jasa yang diberikan pada pegawai dengan cuma-cuma atau dengan harga rendah yang secara nyata memberikan manfaat untuk pegawai. Tidak termasuk pemberian yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, seperti sumbangan kebakaran, kebanjiran dan sebagainya.

Dalam hal makanan yang disediakan untuk pegawai dengan harga rendah, maka harga tersebut pada prinsipnya dimasukkan dalam upah dan gajinya dalam bentuk barang, juga sama halnya untuk penyediaan rumah tempat tinggal bagi pegawai dimasukkan sebagai upah dan gaji pegawai dalam bentuk barang.

Pakaian kerja yang diberikan secara cuma-cuma kepada pegawai tidak dimasukkan sebagai upah dan gaji dalam bentuk barang, kecuali pakaian yang umum dipakai di luar jam kerja. Upah dan gaji dalam bentuk barang biasanya penting dalam kasus di negara sedang berkembang. Misalnya petani seringkali membayar pekerja-pekerjanya sebagai bagian upah dan gaji dalam bentuk hasil pertanian, perkebunan dan sebagainya, menyediakan perumahan secara gratis, subsidi penyediaan dan barang-barang untuk kebutuhan pegawainya. Demikian juga halnya untuk kegiatan penggalian.

Pada umumnya pengusaha membayarkan iuran pensiun atau iuran tunjangan kesejahteraan atas nama pegawainya pada suatu lembaga kesejahteraan atau yayasan dana pensiun dan sebagainya, yang dikelola oleh unit yang terpisah dari kegiatan perusahaan. Yayasan atau lembaga ini akan membayar pensiun, tunjangan kesejahteraan dan sebagainya apabila terjadi klaim. Apabila perusahaan membayar pensiun, tunjangan keluarga dan sebagainya langsung kepada pegawainya, maka besarnya iuran tersebut perlu diimputasi. Besarnya imputasi ini diperkirakan sama dengan besarnya pembayaran pensiun atau tunjangan kesejahteraan yang benar-benar dibayarkan pada waktu sekarang kepada pegawai yang sudah pensiun, (dengan asumsi bahwa jumlah komposisi pegawai yang dicakup dalam dana pensiun/kesejahteraan dan perbandingan antara skala upah dan gaji dan besarnya pensiun relatif tetap tidak berubah).

b. Surplus Usaha

Surplus usaha adalah sama dengan selisih nilai tambah bruto dengan balas jasa pegawai, penyusutan barang modal tetap dan pajak tidak langsung neto. Surplus usaha meliputi pengeluaran atas sewa tanah, bunga modal dan keuntungan;

(a) Sewa tanah

Dimaksudkan di sini pengeluaran perusahaan untuk sewa tanah karena ikut sertanya faktor produksi tanah dalam proses produksi. Sewa dibayar untuk tanah pertanian ataupun tanah lainnya yang digunakan dalam kegiatan usaha. Dalam sewa termasuk juga royalti yaitu pembayaran untuk hak paten, hak cipta, merk dagang, hak perusahaan hutan dan sebagainya.

(b) Bunga Modal

Yang dimaksud dengan bunga modal adalah pengeluaran perusahaan untuk membayar bunga dari modal yang dipinjam yang digunakan dalam kegiatan usaha.

(c) Keuntungan Perusahaan

Mencakup keuntungan perusahaan sebelum dipotong pajak perusahaan dan pajak langsung lainnya dan sebelum dibagikan sebagai deviden. Keuntungan perusahaan di sini merupakan selisih antara surplus usaha dengan sewa tanah dan bunga modal. Jadi masih pula termasuk berbagai pengeluaran transfer yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

3.6.2. Penyusutan Barang Modal

Barang-barang modal yang dipakai dalam proses produksi selalu mengalami kerusakan dan pada suatu waktu tidak berfungsi lagi dan akhirnya akan menjadi barang bekas yang kalau dijual tidak akan memberikan nilai yang berarti. Di samping itu untuk barang modal yang belum sempat dipakai dalam proses produksi, pada masa mendatang akan mengalami penurunan nilai walaupun tidak secepat jika dipakai. Ini disebabkan oleh karena munculnya barang modal baru yang lebih efisien dan lebih produktif jika dibandingkan dengan barang modal yang lama tersebut, jadi di sini penyusutan itu terjadi oleh karena adanya perkembangan teknologi.

Bertitik tolak pada masalah yang akan dihadapi tersebut selayaknyalah para pengusaha menyediakan/menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk mengganti barang modalnya yang setiap saat kehilangan sekian persen dari nilai barang modal tersebut. Dengan demikian pada waktu barang modal yang lama tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi, uang yang disisihkan itu dapat dipakai untuk membeli barang modal yang baru. Penyediaan biaya ini dalam perhitungan pendapatan regional disebut penyusutan barang modal. Turunnya nilai barang modal yang disebabkan oleh kecelakaan atau bencana alam yang tidak bisa diramalkan sebelumnya, seperti akibat gempa bumi, perang, kebakaran, yang menghancurkan barang modal yang sudah ada, tidak termasuk dalam perhitungan penyusutan. Penurunan atau hilangnya nilai barang modal tersebut dianggap sebagai hilangnya kapital pada waktu terjadinya bencana tersebut. Barang modal yang dimaksud di sini hanya mencakup yang berbentuk fisik saja, tidak termasuk barang modal non fisik, seperti konsesi hutan, hak paten, hak cipta dan sebagainya.

3.6.3. Pajak tak Langsung Neto

Pajak tidak langsung neto adalah merupakan selisih antara pajak tidak langsung dengan subsidi.

a. Pajak tak langsung

Pajak tidak langsung yang dibayar oleh perusahaan terdiri dari iuran wajib ke pemerintah yang diperlakukan sebagai biaya untuk kegiatan produksi. Pajak tidak langsung ini termasuk segala jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan produksi, penjualan, pembelian atau penggunaan barang dan jasa oleh perusahaan/usaha. Suatu perusahaan/usaha dapat membayar pajak tidak langsung kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat. Pajak tidak langsung dibagi ke dalam pajak komoditi dan pajak tidak langsung lainnya. Pajak komoditi mencakup seluruh pajak tidak langsung yang bervariasi sesuai dengan kuantitas atau nilai dari komoditi yang

diimpor, diproduksi atau dijual. Contoh dari pajak komoditi adalah pajak impor, pajak ekspor, bea masuk, pajak penjualan, pajak hiburan dan pajak judi. Pajak tidak langsung lainnya meliputi lisensi usaha, pajak real estate dan pajak atas penggunaan harta untuk usaha. Pajak komoditi dikurangi subsidiya, menghasilkan pajak komoditi neto.

Beberapa perusahaan pemerintah diberi hak monopoli untuk memproduksi dan/atau menjual komoditi tertentu. Perusahaan yang diberi hak monopoli ini biasanya memproduksi atau menjual satu jenis komoditi saja, seperti jasa angkutan kereta api, jasa telekomunikasi dan sebagainya. Pada prinsipnya selisih antara surplus usaha dengan keuntungan normal diperlakukan sebagai pajak komoditi. Dalam praktek total surplus usaha diperlakukan sebagai pajak komoditi, karena tidak ada dasar untuk memperkirakan secara tepat keuntungan normalnya. Kadang-kadang perusahaan pemerintah juga menganut semi monopoli, yang memproduksi komoditi yang sama dengan yang diproduksi oleh perusahaan swasta. Surplus usaha dari perusahaan pemerintah ini dikurangi bila mungkin dengan keuntungan normal yang dapat diukur berdasarkan keuntungan normal perusahaan swasta yang memproduksi komoditi yang sejenis. Selisih keuntungan normal ini diperlakukan sebagai pajak komoditi bila surplus usaha tersebut cukup besar dan direncanakan untuk menambah penerimaan pemerintah.

Permasalahan bisa timbul di dalam memutuskan apakah pembayaran tertentu oleh perusahaan kepada pemerintah adalah sebagai pajak tidak langsung atau sebagai pembayaran atas barang dan jasa pemerintah. Jika antara pengeluaran dan perolehan terhadap barang dan jasa pemerintah menunjukkan suatu manfaat yang jelas dan pembayarannya secara sukarela, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai suatu pembayaran untuk barang dan jasa pemerintah. Pembayaran barang dan jasa pemerintah secara wajib dimasukkan sebagai pajak tidak langsung apabila dibayar oleh perusahaan, misalnya pengeluaran wajib uji kendaraan dan izin mengemudi, paspor, jasa pengadilan dan pajak pelabuhan. Apabila yang membayar adalah rumah tangga maka diperlakukan sebagai pajak langsung.

Pajak real estate dan tanah dimasukkan sebagai pajak tidak langsung kecuali dalam hal di mana pajak tersebut dipertimbangkan sebagai suatu prosedur administratif untuk taksiran dan pengumpulan pajak langsung. Di dalam hal bangunan yang disewakan, pajak real estate secara keseluruhan termasuk dalam biaya sewa, oleh sebab itu ditetapkan sebagai pajak tidak langsung. Hal demikian juga banyak terjadi dalam kasus pajak atas tanah dan kekayaan lainnya merupakan bagian dari pajak langsung atas kekayaan.

b. Subsidi

Subsidi adalah dana bantuan yang diberikan kepada perusahaan dari pemerintah. Bantuan pemerintah kepada perusahaan untuk tujuan investasi atau menutupi kerugian akibat bencana diperlakukan sebagai transfer modal bukan sebagai subsidi. Bantuan kepada perusahaan oleh pemerintah yang dimasukkan sebagai subsidi didasarkan atas penilaian komoditi yang diproduksi, di ekspor atau dikonsumsi, buruh atau tanah yang diikutsertakan dalam proses

produksi atau cara bagaimana produksi diorganisir dan diadakan. Subsidi yang dihubungkan terhadap nilai komoditi khusus yang diproduksi, diekspor atau dikonsumsi adalah subsidi komoditi. Contoh dari subsidi komoditi adalah bantuan dana terhadap produsen beras, pupuk dan komoditi lainnya agar harganya rendah, atau agar harga ekspor komoditi tertentu turun. Beberapa jenis bantuan pemerintah ke produsen yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi, tetapi mempunyai pengaruh dengan jumlah pembelian konsumen, seperti bantuan-bantuan sosial diperlakukan sebagai transfer bukan sebagai subsidi.

Seluruh bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan misalnya untuk mengganti kerugian operasional, dan mempertahankan harga pada tingkat tertentu, dimasukkan sebagai subsidi. Transfer yang diberikan kepada perusahaan pemerintah yang bersaing dengan perusahaan swasta untuk menutupi kerugian besar selama beberapa tahun tersebut diperlakukan sebagai subsidi. Kerugian perusahaan niaga pemerintah yang disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah di mana harga penjualan komoditi lebih rendah dari harga pembelian, diperlakukan sebagai subsidi. Karena pengoperasian perusahaan pemerintah yang tidak mendapat penggantian berupa subsidi, diperlakukan sebagai surplus usaha yang negatif.

Subsidi dicatat pada waktu terjadinya pembayaran. Waktu pencatatan di perusahaan akan berbeda dengan di pemerintah, sehingga untuk memperkirakan besarnya subsidi dilakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap perbedaan tersebut. Besarnya subsidi yang diberikan pada perusahaan dagang diperkirakan atas perbedaan harga beli dan harga jual yang diperhitungkan dan dicatat saat mana barang tersebut merupakan stok di dalam perusahaan tersebut.

3.7. Komponen Penggunaan

Komponen PDRB menurut penggunaan terdiri dari:

- (a) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
- (b) Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Swasta yang tidak Mencari Untung
- (c) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
- (d) Pembentukan Modal Tetap Bruto
- (e) Perubahan Stok
- (f) Ekspor dan Impor

3.7.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atau pembelian barang baru baik tahan lama, kecuali pembelian rumah, maupun tidak tahan lama dan jasa-jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga penduduk suatu daerah, dikurangi dengan hasil penjualan neto (penjualan dikurangi dengan pembelian) barang-barang bekas.

Dalam pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga termasuk juga konsumsi/pembelian langsung oleh rumah tangga yang dilakukan di luar daerah/luar negeri. Oleh karena itu pembelian (konsumsi) langsung penduduk suatu daerah di luar daerahnya diperlakukan sebagai impor, sebaliknya pembelian (konsumsi) langsung yang dilakukan oleh bukan penduduk di daerah tersebut diperlakukan sebagai

ekspor. Pengeluaran rumah tangga yang sedang mengadakan perjalanan dinas yang pengeluarannya dibiayai oleh perusahaan atau kantor tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga karena merupakan biaya antara dari perusahaan atau kantor yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dicatat pada waktu terjadinya persetujuan transaksi jual beli terhadap suatu barang dan jasa, tanpa melihat penundaan waktu penyerahan barang dan jasa tersebut. Dalam hal pembelian secara sewa beli, pembelian dianggap sah semenjak kontrak jual beli barang atau jasa disetujui/ ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada perjanjian tertulis, maka pencatatan dapat dilakukan pada waktu barang tersebut diserahkan. Penilaian terhadap barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi rumah tangga adalah atas dasar harga pembeli, termasuk segala macam biaya yang dikeluarkan sampai barang-barang tersebut siap untuk dipakai atau dikonsumsi.

Barang yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri oleh rumah tangga produsen dinilai atas dasar harga produsen. Apabila tidak terdapat harga produsen, maka dinilai atas dasar harga pokok barang tersebut. Penilaian barang-barang yang dikonsumsi sendiri harus sama dengan harga yang dipakai dalam penilaian output secara keseluruhan.

3.7.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Swasta yang tidak Mencari Untung

Pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung sama dengan nilai outputnya yang meliputi pembelian (termasuk penerimaan transfer dalam bentuk natura) dari barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak tak langsung neto yang dibayar lembaga ini, dikurangi penjualan barang dan jasa yang dihasilkan.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat atas dasar tidak mencari untung, seperti organisasi perburuhan, persatuan profesi, organisasi politik, lembaga keagamaan, lembaga penelitian, pendidikan, kesehatan, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tidak mementingkan keuntungan. Lembaga swasta ini ada yang mempunyai status badan hukum, yayasan dan lainnya.

3.7.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sama dengan besarnya nilai jasa yang dihasilkan yang dikonsumsi sendiri. Nilai dari jasa ini adalah sebesar nilai produksi bruto yang terdiri dari pembelian barang dan jasa pembayaran belanja pegawai dan biaya penyusutan barang modal pemerintah, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan yang tak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Kegiatan pemerintah yang tercakup di sini adalah yang merupakan kegiatan administrasi umum dan pertahanan saja.

Pengeluaran konsumsi pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari pengeluaran konsumsi untuk daerah tingkat II dan desa ditambah dengan bagian dari konsumsi daerah tingkat I dan pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah tingkat II.

3.7.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Yang dimaksud dengan pembentukan modal tetap bruto dalam suatu daerah adalah semua barang modal baru yang digunakan/dipakai sebagai alat untuk memproduksi di daerah tersebut. Barang-barang modal tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli dari luar daerah ataupun dari pengadaan di daerah itu sendiri. Dalam barang modal baru termasuk pembelian barang modal bekas dari luar daerah.

Yang dikategorikan ke dalam barang modal adalah barang yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih, dan yang dimaksud dengan pemakaian adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat yang tetap dalam memproduksi. Barang-barang yang tidak diproduksi kembali seperti tanah, cadangan mineral tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto, akan tetapi pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain serta pengeluaran untuk perluasan areal pertambangan semuanya merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto.

Pengeluaran untuk perbaikan barang-barang modal yang mengakibatkan bertambah panjangnya umur pemakaian atau menambah kapasitas produksi dari barang-barang modal tersebut juga merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Jadi semua pengeluaran yang bersifat rutin seperti pembelian barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi tidak termasuk dalam kategori pembentukan modal tetap bruto, dan penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang modal apkriran di dalam daerah tersebut juga tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto karena, barang-barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada waktu pertama kali dibeli. Lain halnya barang-barang modal bekas yang dibeli dari luar daerah akan merupakan pembentukan modal tetap bruto, karena di dalam daerah yang sekarang barang-barang tersebut belum pernah dihitung.

Pembentukan modal tetap mencakup:

- (1) Barang modal dalam bentuk konstruksi, mesin-mesin, alat angkutan dan perlengkapan yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.
- (2) Biaya untuk perubahan dan perbaikan berat barang-barang modal yang akan meningkatkan produktivitas atau memperpanjang umur pemakaian.
- (3) Pengeluaran untuk pengembangan dan pembukaan tanah, perluasan areal hutan, penanaman kembali hutan (reboisasi) perluasan daerah pertambangan serta penanaman dan peremajaan tanaman keras.
- (4) Pembelian ternak produktif untuk keperluan pembiakan, pemerahan susu, pengangkutan dan sebagainya, tetapi tidak termasuk ternak potong.
- (5) Margin perdagangan, dan ongkos-ongkos lain yang berkenan dengan transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak penguasaan hutan, hak paten, hak cipta dan barang-barang modal bekas.

Pembelian barang-barang modal pada prinsipnya harus dicatat sebagai pembentukan modal tetap pada waktu perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam hal pembelian barang-barang modal yang harus dilengkapi dengan surat-surat khusus maka biasanya pemindahan hak tersebut sah apabila kontrak jual beli sudah ditandatangani. Dan untuk barang-barang tersebut adalah apabila barang sudah siap dipakai oleh para pemesan, kecuali bangunan atau konstruksi, waktu penilaian adalah tergantung pada bangunan atau konstruksi tersebut selesai dibangun, maka dalam hal ini bagian yang dimasukkan

dalam perhitungan pembentukan modal adalah sebesar pengeluaran terhadap bagian-bagian yang sudah disesuaikan saja, termasuk pengeluaran untuk upah dan gaji, bahan-bahan bangunan dan segala macam biaya umum.

Pembentukan modal tetap harus dinilai berdasarkan jumlah uang yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh pembeli dalam usaha untuk memperoleh barang tersebut. Jadi dalam penilaian sesuatu barang modal selain harga yang berlaku juga harus ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para pembeli seperti biaya transpor, biaya instalasi, pembayaran untuk arsitek dan konsultasi teknik lainnya, segala pengeluaran dan persiapan-persiapan sehubungan dengan pengadaan barang modal tersebut termasuk bea masuk dan pajak tidak langsung lainnya.

Barang modal hasil produksi sendiri seharusnya dinilai dengan harga pasar. Akan tetapi adakalanya harga pasar untuk barang-barang semacam itu tidak tersedia seperti misalnya pembangunan dan perluasan areal pertanian dan perombakan barang modal lainnya oleh para pemilik. Pembentukan modal tetap dalam hal ini dapat dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan termasuk nilai tenaga kerja sendiri yang digunakan. Pembentukan modal tetap dapat digolongkan menurut jenis barang modal dan menurut lapangan usaha para pembeli/pemilik barang modal tersebut.

3.7.5. Perubahan Stok

Yang dimaksud dengan stok adalah persediaan barang-barang baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi. Para pemegang stok tersebut adalah produsen, pedagang dan pemerintah. Yang termasuk stok pada pemerintah adalah barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan pada waktu kritis.

Apabila semua stok akhir tahun yang ada pada produsen, pedagang dan pemerintah tersebut dikurangi dengan stok awal tahun maka akan diperoleh perubahan stok pada suatu tahun. Perubahan stok nilainya dapat positif dan dapat pula negatif. Apabila positif berarti terjadi penambahan stok tetapi nilai negatif terjadi pengurangan stok.

Penilaian terhadap penambahan stok adalah berdasarkan harga pembelian apabila barang tersebut dibeli dari unit ekonomi lainnya dan berdasarkan harga produsen apabila barang tersebut merupakan hasil produksi dari si pemegang stok. Penilaian harus berdasarkan harga yang berlaku pada waktu penambahan stok tersebut dilakukan.

3.7.6. Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor meliputi transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu daerah dengan penduduk daerah lain (termasuk dengan negara lain). Transaksi tersebut meliputi ekspor dan impor barang, pengangkutan, komunikasi, jasa-jasa, asuransi dan berbagai jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima oleh pedagang daerah tersebut yang kegiatannya mengadakan transaksi barang di luar daerah tersebut. Juga termasuk di sini transaksi dari beberapa barang tertentu seperti barang dan jasa

yang langsung dibeli di pasar domestik oleh bukan penduduk daerah tersebut, dan juga pembelian langsung di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut.

Transaksi barang dan jasa yang dimaksud adalah semua barang dan jasa yang melintasi batas geografis suatu daerah. Penduduk suatu daerah terdiri dari badan pemerintah, perorangan, perusahaan dan lembaga swasta yang tidak mencari untung di daerah tersebut.

Penjualan dan pembelian kapal terbang dan kapal laut yang baru maupun yang bekas ke atau dari negara atau daerah lain merupakan ekspor dan impor barang. Barang-barang yang melintasi batas geografis suatu daerah, akan tetapi hanya merupakan tempat persinggahan saja dalam perjalanan menuju atau kembali ke suatu tempat, barang-barang untuk peragaan, barang-barang sebagai bahan penyelidikan, contoh barang, barang-barang kepunyaan turis atau penumpang tidak termasuk di sini.

Barang-barang keperluan pelayaran atau penerbangan yang dibeli pada waktu merapat atau mendarat di pelabuhan luar negeri atau luar daerah dan ikan yang langsung dijual oleh kapal-kapal penangkap ikan milik penduduk suatu daerah kepada penduduk daerah lain merupakan transaksi barang dan jasa yang harus dimasukkan dalam ekspor dan impor.

3.8. Klasifikasi Sektor

Kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu negara/daerah beraneka ragam sifat dan jenisnya. Berbagai kegiatan yang bercorak ragam ini perlu dikelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan yang sama, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah suatu kegiatan termasuk dalam kelompok kegiatan ekonomi tertentu seperti misalnya pertanian, industri, jasa-jasa dan sebagainya. Pengelompokkan kegiatan ekonomi sering pula disebut Klasifikasi Sektor Lapangan Usaha.

Pembagian kegiatan ekonomi ke dalam sektor didasarkan pada kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam cara memproduksi, sifat dan jenis barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dan penggunaan barang dan jasa bersangkutan. Yang dimaksud dengan cara memproduksi dalam penyusunan klasifikasi ini adalah yang berkaitan dengan proses, teknologi dan organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa tersebut.

Keseragaman konsep/definisi dan klasifikasi diperlukan dalam rangka keterbandingan antara data yang dihasilkan, sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antar wilayah, antar waktu atau antar karakteristik tertentu dapat dilakukan.

Dalam upaya memperoleh keterbandingan data yang dihasilkan oleh berbagai negara, PBB menerbitkan publikasi mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha yang berjudul: *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*. Publikasi ini telah direvisi beberapa kali, sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Revisi pertama diterbitkan pada tahun 1958, revisi kedua diterbitkan tahun 1968 dan revisi ketiga tahun 1990. Dalam klasifikasi lapangan usaha secara internasional, lapangan usaha dibagi dalam sepuluh sektor sebagai berikut:

- (1) Pertanian; Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- (2) Pertambangan dan Penggalian
- (3) Industri Pengolahan
- (4) Listrik, Gas dan Air

- (5) Konstruksi
- (6) Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan perhotelan
- (7) Pengangkutan dan Komunikasi
- (8) Lembaga Keuangan, Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan
- (9) Pemerintahan dan Jasa Swasta (Jasa Sosial, Hiburan dan Perorangan)
- (10) Kegiatan yang belum jelas batasannya.

Untuk pengumpulan data secara nasional, biasanya terhadap klasifikasi yang diterbitkan oleh PBB ini dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang berlaku di tiap negara. Demikian juga halnya dengan di Indonesia, BPS menerbitkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang menjadi pegangan bagi pengumpulan statistik di Indonesia. Dalam penyusunan pendapatan nasional ataupun pendapatan regional, klasifikasi sektor yang dipakai terdiri dari 9 sektor sebagai berikut:

- (1) Pertanian;
- (2) Pertambangan dan Penggalian;
- (3) Industri pengolahan,
- (4) Listrik, Gas dan Air Minum;
- (5) Konstruksi;
- (6) Perdagangan, Restoran dan Perhotelan
- (7) Pengangkutan dan Komunikasi;
- (8) Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan;
- (9) Jasa- Jasa.

Sektor-sektor tersebut dapat dirinci lagi dalam berbagai subsektor. Khusus untuk sektor Sewa Rumah dan sektor Pemerintahan dan Pertahanan yang dalam KLUI merupakan bagian dari subsektor real estate dan jasa kemasyarakatan, namun untuk keperluan pendapatan nasional/regional diangkat menjadi sektor tersendiri. Pembagian sektor-sektor menjadi subsektor dan rincian yang lebih rinci lagi serta ruang lingkup dan definisinya, disajikan dalam penerbitan BPS: Kalsifikasi Lapangan Usaha Indonesia.

3.9. Susunan Produk Domestik Regional Bruto

Struktur PDRB dapat berbeda-beda tergantung dari sudut mana suatu perekonomian ditinjau. Struktur dapat menurut:

- a. Lapangan Usaha
- b. Andilnya Faktor Produksi, dan
- c. Penggunaan Produk Akhir.

3.9.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Penyajian PDRB menurut lapangan usaha akan memberikan gambaran mengenai peranan masing-masing sektor dalam menciptakan nilai tambah di daerah tersebut. Untuk itu unit-unit produksi dikelompokkan menurut lapangan usaha (sektor) kemudian disajikan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari masing-masing sektor tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam sembilan sektor :

- 1) Pertanian; Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air Minum
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi
- 8) Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa-Jasa

3.9.2. PDRB Menurut Andilnya Faktor Produksi

PDRB menurut andilnya faktor produksi disajikan menurut besarnya balas jasa yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Balas jasa faktor produksi tersebut adalah:

- (a) balas jasa yang diterima oleh pekerja berupa upah dan gaji,
- (b) pendapatan dari unit-unit produksi yang tidak berbadan hukum,
- (c) pendapatan dari sewa tanah dan royalti,
- (d) bunga dan
- (e) keuntungan.

Selain itu ditambahkan penyusutan dan pajak tidak langsung neto untuk sampai pada konsep produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar. Jumlah (b), (c), (d) dan (e) biasa disebut **Surplus Usaha**.

3.9.3. PDRB Menurut Jenis Penggunaan

Penyajian dalam bentuk ini menggambarkan bagaimana penggunaan dari pada barang dan jasa akhir oleh berbagai kegiatan ekonomi. Penggunaan di sini terdiri dari penggunaan untuk keperluan konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, penggunaan sebagai barang modal tetap serta ekspor neto, sedangkan yang belum digunakan pada tahun laporan akan diperhitungkan sebagai perubahan stok. Secara terinci penyajian akan berbentuk sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran akhir konsumsi rumah tangga
- 2) Pengeluaran akhir konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung
- 3) Pengeluaran akhir konsumsi pemerintah
- 4) Pembentukan modal tetap bruto
- 5) Perubahan stok
- 6) Ekspor neto (Ekspor-Impor)

BAB IV METODOLOGI

4.1. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Pendapatan Regional Kabupaten/Kota atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud dengan metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode langsung akan dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Di samping itu manfaat pemakaian data daerah dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah. Hasil penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah ini.

Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan 3 macam pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan produksi
- b. Pendekatan pendapatan
- c. Pendekatan pengeluaran.

Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokir pendapatan regional Provinsi menjadi pendapatan regional Kabupaten/Kota dengan memakai berbagai macam indikator produksi atau indikator lainnya yang cocok sebagai alokator. Dalam prakteknya, kadang-kadang metode alokasi terpaksa digunakan dalam memperkirakan data Provinsi dan kabupaten/Kota untuk sektor-sektor tertentu seperti penerbangan, pelayaran, dan segala bentuk cabang usaha yang mempunyai kantor pusat di lain daerah.

Hasil metode alokasi dapat juga digunakan selaku kontrol terhadap penghitungan pendapatan regional masing-masing kabupaten/Kota. Salah satu asumsi yang dipergunakan di dalam metode alokasi adalah tersedianya data pendapatan regional Provinsi yang baik. Tanpa adanya data pendapatan regional Provinsi yang baik, hasil metode alokasi untuk Kabupaten tidak akan memuaskan. Namun tidak dapat disangkal bahwa penggunaan metode alokasi dapat pula digunakan untuk mengecek metode langsung. Sebaliknya metode langsung dapat juga membantu penyempurnaan perhitungan pendapatan regional Provinsi.

4.1.1. Metode Langsung

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor. Pendekatan ini biasa juga disebut dengan pendekatan nilai tambah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai

yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

b. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa di dalam wilayah kabupaten/Kota. Jadi produk domestik regional dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- (a) Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang, metode penjualan eceran dan metode penilaian eceran.
- (b) Melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga metode data anggaran belanja, metode balance sheet dan metode statistik perdagangan luar negeri.

Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto dan perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor).

4.1.2. Metode Tidak Langsung (Metode Alokasi)

Yang dimaksud dengan metode alokasi pendapatan regional Provinsi adalah menghitung pendapatan regional Kabupaten dengan cara mengalokir angka pendapatan regional Provinsi untuk tiap-tiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan alokator tertentu.

Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan atas: (a) Nilai produksi bruto atau neto, (b) Jumlah produksi fisik, (c) Tenaga kerja, (d) Penduduk, dan (e) Alokator lainnya yang dianggap cocok untuk daerah tersebut.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut dapat diperhitungkan prosentase bagian masing- masing Kabupaten/Kota terhadap nilai tambah setiap sektor atau subsektor.

Urutan sederhana dari cara alokasi untuk kabupaten/Kota dapat diuraikan berikut:

1. Melalui inventarisasi data sekunder, kumpulkanlah sebanyak mungkin data/informasi untuk semua kabupaten/Kota. Data yang dikumpulkan meliputi: data produksi, indikator produksi, tarif, harga dan lainnya, masing- masing per kabupaten/kota.

2. Sebaiknya penghitungan dengan cara alokasi, dilihat dari segi pengumpulan data dan proses penghitungan, dilakukan bersamaan dengan penghitungan Provinsi.
3. Hitunglah nilai produksi untuk sektor/kegiatan yang memang dimungkinkan dihitung. Perhitungannya adalah:
 - Kwantum produksi x Harga (masing-masing kabupaten)
 - Jumlah indikator produksi x Tarif (masing-masing kabupaten)
4. Hitunglah nilai tambah untuk masing-masing sektor/kegiatan untuk semua kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - (a) Untuk sektor yang tersedia nilai produksinya:

$$NTB_i = \frac{O_i}{\sum O_i} * NTB$$

dimana:

NTB_i = Nilai

Tambah untuk Kabupaten i.

O_i = Nilai Produksi untuk Kabupaten i.

Σ O_i = Jumlah nilai produksi untuk n kabupaten

n = Banyaknya kabupaten/Kota di Provinsi

NTB = Nilai Tambah Bruto suatu sektor di Provinsi

Perlu diingat bahwa Σ O_i tidak selalu sama dengan output Provinsi untuk perhitungan Provinsi yang dilakukan secara terpisah.

- (b) Untuk sektor yang tidak tersedia nilai produksinya:

$$NTB_i = \frac{X_i}{\sum X_i} * NTB$$

dimana: X_i = Jumlah indikator produksi untuk kabupaten i.

Σ X_i = Jumlah indikator produksi untuk n kabupaten.

Pilihlah secara tepat indikator produksi yang dipakai sebagai alokator, dengan pertimbangan indikator tersebut dapat menggambarkan sebaik mungkin produksi yang sebenarnya.

4.2. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Oleh karenanya untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produktivitas secara nyata, faktor pengaruh atas perubahan harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

Penghitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Produk domestik menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas dan kapasitas produksi dari masing-masing lapangan usaha tersebut.

Produk riil per kapita biasanya juga dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk perencanaan dan proyeksi pada masa yang akan datang atau ramalan dan penentuan target, selalu bertitik tolak dari penghitungan atas dasar harga konstan.

Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat juga mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan cara:

(a) Revaluasi atas kuantum pada tahun berjalan dengan harga tahun dasar.

Cara ini adalah mengalikan kuantum pada tahun yang berjalan dengan harga tahun dasar. Hasilnya adalah nilai atas dasar harga konstan.

(b) Ekstrapolasi atas nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum.

Cara mengalikan nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum dibagi 100.

(c) Deflasi atas suatu nilai pada tahun berjalan dengan suatu indeks harga.

Cara ini adalah membagi nilai tahun berjalan dengan suatu indeks harga dibagi 100.

Dari sudut teori, indeks kuantum dalam hal ekstrapolasi haruslah yang disusun menurut rumus Laspeyres sedangkan indeks harga untuk hal deflasi haruslah yang disusun menurut rumus Paasche. Namun, dalam prakteknya dijumpai beberapa masalah. Tersedianya data indeks harga yang disusun menurut rumus Paasche merupakan suatu masalah. Hal ini disebabkan karena indeks ini membutuhkan timbangan kuantum dari tahun yang berjalan yang berarti bahwa setiap tahun suatu timbangan harus ditentukan. Oleh karena itu maka biasanya pilihan penyusunan indeks lebih sering memakai rumus Laspeyres. Karena dalam praktek seringkali hanya indeks Laspeyres yang tersedia, indeks ini dipakai untuk menghi-tung nilai atas dasar harga konstan.

Dalam hal deflasi nilai atas dasar harga berlaku, pemakaian indeks harga dengan rumus Laspeyres menimbulkan suatu kesalahan dalam hasil estimasinya. Kesalahan ini akan makin besar apabila perbedaan antara timbangan pada tahun dasar dengan timbangan pada tahun yang berjalan makin besar. Perkiraan produk/pendapatan domestik atas dasar harga konstan dapat dilakukan pada PDRB menurut lapangan usaha dengan cara menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan untuk berbagai lapangan usaha, atau terhadap PDRB menurut pengeluaran yaitu dengan menghitung komponen- komponen pengeluaran atas dasar harga konstan.

4.2.1. Pendekatan untuk menghitung nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan

Nilai tambah bruto sektoral atas dasar harga konstan dapat dihitung dengan cara menggunakan dua teknik yaitu i) teknik indikator ganda dan ii) teknik indikator tunggal.

a. Teknik Indikator Ganda

Teknik ini biasanya disebut juga sebagai teknik deflasi ganda. Pada cara ini, perkiraan atas dasar harga konstan untuk masing-masing nilai produksi dan biaya antara dibuat secara terpisah. Penghitungan atas dasar harga konstan bagi masing-masing nilai produksi ataupun biaya antara dapat dilakukan dengan cara revaluasi, atau cara

ekstrapolasi, atau dengan cara deflasi. Setelah perkiraan atas dasar harga konstan diperoleh, maka nilai output atas dasar harga konstan dikurangi dengan nilai biaya antara atas dasar harga konstan akan menghasilkan nilai tambah atas dasar harga konstan (Catatan: pengertian deflasi ganda yang murni adalah untuk mendapatkan nilai tambah atas dasar harga konstan masing-masing output dan biaya antara atas dasar harga konstan dihitung dengan cara deflasi). Atau dengan rumus:

$$NTB_k = NP_k - NBA_k$$

dimana: NTB_k = nilai tambah bruto atas dasar harga konstan
 NP_k = nilai produksi atas dasar harga konstan
 NBA_k = nilai biaya antara atas dasar harga konstan

b. Teknik Indikator Tunggal

Pada teknik indikator tunggal, maka perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh secara langsung dengan cara menggunakan metode deflasi harga terhadap nilai tambah atas dasar harga yang berlaku atau dengan metode ekstrapolasi kuantum terhadap nilai tambah pada tahun dasar.

Jelasnya dengan **metode deflasi**, nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai tambah bruto tahun yang berjalan dengan indeks harga pada masing-masing tahun dibagi 100.

$$NTB_{T,k} = \frac{NTB_{T,k}}{\frac{IH_T}{100}}$$

dimana:

$NTB_{T,k}$ = nilai tambah bruto atas dasar harga konstan tahun T.

$NTB_{T,b}$ = nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku tahun T.

IH_T = indeks harga tahun T.

Indeks harga yang dipakai dapat berupa indeks harga yang berkaitan dengan produksi atau biaya antara.

Dengan **metode ekstrapolasi**, nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah bruto pada tahun dasar dengan indeks kuantum masing-masing tahun dibagi 100.

$$NTB_{T,k} = NTB_o * \frac{IK_T}{100}$$

dimana: NTB_o = nilai tambah bruto tahun dasar dan
 IK_T = indeks kuantum tahun T.

Indikator kuantum atau volume yang dipakai dapat berupa indikator produksi, biaya antara atau indikator lain yang erat kaitannya dengan produktivitas seperti tenaga kerja, kapasitas produksi (mesin, kendaraan) dan sebagainya.

Pemilihan antara cara Teknik Deflasi Ganda dan Teknik Indikator Tunggal tergantung antara lain pada perkembangan harga output dan harga input yang terjadi pada suatu sektor. Apabila perkembangan kedua jenis harga tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, maka Teknik Deflasi Ganda yang dipilih. Demikian pula halnya apabila rasio input-outputnya selalu berubah-ubah setiap tahun. Jika hal-hal tersebut di atas tidak terjadi maka Teknik Indikator Tunggal dapat dipakai.

Kemungkinan lain dalam menghitung NTB atas dasar konstan dapat pula dilakukan dengan mengestimasi nilai produksi dengan cara revaluasi, ekstrapolasi kuantum atau deflasi harga, kemudian untuk memperoleh estimasi biaya antara digunakan rasio input-output yang diperoleh dari suatu survey tahun dasar. Cara ini hanya dibenarkan, apabila hubungan antara input dan output dalam bentuk fisik tetap tidak berubah sepanjang waktu.

4.2.2. Pendekatan untuk Menghitung PDRB Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan

Dalam hal PDRB menurut penggunaan, perkiraan atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dengan cara mendeflasi nilai atas dasar harga berlaku dari berbagai komponen pengeluaran dengan indeks harga yang sesuai. Misalnya indeks harga yang sesuai untuk masing-masing komponen tersebut adalah indeks harga konsumen untuk konsumsi rumah tangga, indeks harga perdagangan besar untuk konsumsi pemerintah dan perdagangan antar daerah, dan indeks harga perdagangan besar barang-barang investasi untuk pembentukan modal bruto.

BAB V
PENYAJIAN

Hasil penghitungan PDRB Kabupaten/Kota secara garis besar disajikan berupa tabel-tabel pokok PDRB dan tabel-tabel turunan PDRB, masing-masing atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

5.1. Tabel Pokok PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tabel ini berasal dari penghitungan nilai tambah bruto seluruh subsektor dan sektor, dengan bentuk sebagai berikut:

**TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/
KOTA ... MENURUT LAPANGAN USAHA, ATAS DASAR
HARGA BERLAKU TAHUN 2004 – 2007 (Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}
a. Tanaman Bahan Makanan				
b. ...				
c. dst.				
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	X_{21}	X_{12}	X_{13}	X_{14}
.				
.				
.				
9. JASA-JASA	X_{91}	X_{13}	X_{14}	X_{14}
a. ...				
b. ...				
c. ...				
PDRB	SX_{i1}	SX_{i2}	SX_{i3}	SX_{i4}

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Tabel PDRB atas dasar harga konstan adalah sebagai berikut:

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/

**KOTA ... MENURUT LAPANGAN USAHA, ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 2000*), TAHUN 2004 – 2007 (Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	Y_{11}	Y_{12}	Y_{13}	Y_{14}
a. Tanaman Bahan Makanan				
b. ...				
c. dst.				
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	Y_{21}	Y_{12}	Y_{13}	Y_{14}
.				
.				
.				
9. JASA-JASA	Y_{91}	Y_{13}	Y_{14}	Y_{14}
a. ...				
b. ...				
c. ...				
PDRB	Sy_{i1}	Sy_{i2}	Sy_{i3}	Sy_{i4}

*) Tahun Dasar

c. Agregat PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Pada dasarnya agregat PDRB perkapita suatu kabupaten /Kota adalah hasil bagi antara agregat PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun kabupaten/Kota tersebut, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Penyajiannya adalah dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**TABEL 3. BEBERAPA AGREGAT PENDAPATAN DAN PENDAPATAN PERKAPITA
KABUPATEN/KOTA ... ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 2000*), TAHUN 2004 – 2007 (Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1. Produk Domestik Regional Bruto (... Rp.)				
2. Penyusutan				
3. Produk Domestik Regional Neto Harga Pasar (... Rp.)				
4. Pajak Tak Langsung Neto (... Rp.)				
5. Produk Domestik Regional Neto Biaya Faktor/Pendapatan Regional (... Rp.)				
6. Penduduk Pertengahan Tahun (Orang)				
7. PDRB Perkapita (Rp.)				
8. Pendapatan Regional Perkapita (Rp.)				
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1. Produk Domestik Regional Bruto (... Rp.)				
2. Penyusutan				
3. Produk Domestik Regional Neto Harga Pasar (... Rp.)				
4. Pajak Tak Langsung Neto (... Rp.)				
5. Produk Domestik Regional Neto Biaya Faktor/Pendapatan Regional (... Rp.)				
6. Penduduk Pertengahan Tahun (Orang)				
7. PDRB Perkapita (Rp.)				
8. Pendapatan Regional Perkapita (Rp.)				

*) Tahun Dasar

5.2. Tabel Turunan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan

Tabel turunan pada umumnya berasal dari tabel-tabel pokok tersebut yang disajikan dalam bentuk distribusi persentase dan indeks, masing-masing atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

a. Distribusi Persentase

Tabel distribusi persentase atas dasar harga berlaku berasal dari Tabel 1 yang disajikan dalam persentase, dan atas dasar harga konstan berasal dari Tabel 2. Besar masing-masing subsektor/sector diperoleh dengan cara membagi nilai subsektor/sector dengan nilai PDRB, kali 100 persen. Persentase ini mencerminkan besarnya peranan masing-masing subsektor/sector

dalam perekonomian kabupaten/Kota, serta menunjukkan struktur perekonomian daerah tersebut. Bentuk tabel adalah sebagai berikut:

TABEL 4a. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA ... MENURUT LAPANGAN USAHA, ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2004 – 2007 (%)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	$\frac{X_{11}}{SX_{i1}} \times 100\%$	$\frac{X_{12}}{SX_{i2}} \times 100\%$	$\frac{X_{13}}{SX_{i3}} \times 100\%$	$\frac{X_{14}}{SX_{i4}} \times 100\%$
a. Tanaman Bahan Makanan				
b. ...				
c. dst.				
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN				
.				
.				
.				
9. JASA-JASA				
a. ...				
b. ...				
c. ...				
PDRB	100	100	100	100

TABEL 4b. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA ... MENURUT LAPANGAN USAHA, ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993*), TAHUN 2004 – 2007 (%)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	$\frac{Y_{11}}{SY_{i1}} \times 100\%$	$\frac{Y_{12}}{SY_{i2}} \times 100\%$	$\frac{Y_{13}}{SY_{i3}} \times 100\%$	$\frac{Y_{14}}{SY_{i4}} \times 100\%$
a. Tanaman Bahan Makanan				
b. ...				
c. dst.				
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN				
.				
.				
.				
9. JASA-JASA				
a. ...				
b. ...				
c. ...				
PDRB	100	100	100	100

*) Tahun Dasar

b. Indeks Perkembangan

Tabel turunan ini juga berasal dari Tabel 1 dan 2 yang disajikan dalam bentuk indeks perkembangan, masing-masing atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Indeks perkembangan diperoleh dengan cara membagi nilai subsektor/sector/PDRB tahun berjalan dengan nilai subsektor/sector/PDRB pada tahun dasar, dikalikan dengan 100. Indeks perkembangan pada tahun dasar adalah 100.00. Tabel disajikan sebagai berikut:

**TABEL 5a. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA ...
MENURUT LAPANGAN USAHA, ATAS DASAR
HARGA BERLAKU TAHUN TAHUN 2004 – 2007 (TAHUN DASAR = 100.00)**

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	100	$\frac{X_{12}}{X_{11}} \times 100\%$	$\frac{X_{13}}{X_{11}} \times 100\%$	$\frac{X_{14}}{X_{11}} \times 100\%$
a. Tanaman Bahan Makanan				
b. ...				
c. dst.				
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	100			
.				
.				
9. JASA-JASA	100			
a. ...				
b. ...				
c. ...				
PDRB	100	$\frac{SX_{i2}}{SX_{i1}} \times 100\%$	$\frac{SX_{i3}}{SX_{i1}} \times 100\%$	$\frac{SX_{i4}}{SX_{i1}} \times 100\%$

**TABEL 5b. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA ...
MENURUT LAPANGAN USAHA, ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 1993*), TAHUN 2004 – 2007 (TAHUN DASAR = 100.00)**

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	100	$\frac{Y_{12}}{Y_{11}} \times 100\%$	$\frac{Y_{13}}{Y_{11}} \times 100\%$	$\frac{Y_{14}}{Y_{11}} \times 100\%$
a. Tanaman Bahan Makanan				
b. ...				
c. dst.				
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	100			
.				
.				
9. JASA-JASA	100			
a. ...				
b. ...				
c. ...				
PDRB	100	$\frac{SY_{i2}}{SY_{i1}} \times 100\%$	$\frac{SY_{i3}}{SY_{i1}} \times 100\%$	$\frac{SY_{i4}}{SY_{i1}} \times 100\%$

*) Tahun Dasar

c. Indeks Berantai

Dari Tabel 1 dan 2 dapat diturunkan menjadi tabel berupa indeks berantai masing-masing subsektor/sektor, atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Indeks berantai diperoleh dengan cara membagi nilai subsektor/sektor/PDRB tahun berjalan dengan nilai subsektor/sektor/PDRB tahun sebelumnya, dikalikan dengan 100 (Tahun sebelumnya=100.00). Bentuk tabel sama seperti tabel indeks perkembangan, perbedaannya terletak pada kolom (2), yaitu indeks pada tahun dasar tidak ada isinya. Angka indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/Kota tersebut untuk tahun berjalan. Bentuk tabel adalah sebagai berikut:

**TABEL 6a. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA ...
MENURUT LAPANGAN USAHA, ATAS DASAR
HARGA BERLAKU TAHUN 2004 – 2007**

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	-	$\frac{X_{12}}{X_{i1}} \times 100\%$	$\frac{X_{13}}{X_{i2}} \times 100\%$	$\frac{X_{14}}{X_{i3}} \times 100\%$
a. Tanaman Bahan Makanan				
b. ...				
c. dst.				
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-			
.				
.				
.				
9. JASA-JASA	-			
a. ...				
b. ...				
c. ...				
PDRB	-	$\frac{SX_{i2}}{SX_{i1}} \times 100\%$	$\frac{SX_{i3}}{SX_{i2}} \times 100\%$	$\frac{SX_{i4}}{SX_{i3}} \times 100\%$

**TABEL 6b. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA ...
MENURUT LAPANGAN USAHA, ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 2000*), TAHUN 2004 – 2007**

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. ... c. dst.	-	$\frac{Y_{12}}{Y_{11}} \times 100\%$	$\frac{Y_{13}}{Y_{12}} \times 100\%$	$\frac{Y_{14}}{Y_{13}} \times 100\%$
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN . . .	-			
9. JASA-JASA a. ... b. ... c. ...	-			
PDRB	-	$\frac{SY_{12}}{SY_{11}} \times 100\%$	$\frac{SY_{13}}{SY_{12}} \times 100\%$	$\frac{SY_{14}}{SY_{13}} \times 100\%$

*) Tahun Dasar

d. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan riil PDRB kabupaten/Kota sama dengan indeks berantai atas dasar harga konstan 1993, dikurangi 100. Bentuk tabel seperti terlihat pada Tabel 7. Tabel 7 tersebut dibuat berdasarkan Tabel 6b.

**TABEL 7. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA ...
MENURUT LAPANGAN USAHA,
TAHUN 2004-2007 (TAHUN SEBELUMNYA = 100.00)**

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. ... c. dst.	-	$\frac{Y_{12}}{Y_{11}} \times 100 - 100$	$\frac{Y_{13}}{Y_{12}} \times 100 - 100$	$\frac{Y_{14}}{Y_{13}} \times 100 - 100$
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN . . .	-			
9. JASA-JASA a. ... b. ... c. ...	-			
PDRB	-	$\frac{SY_{12}}{SY_{11}} \times 100 - 100$	$\frac{SY_{13}}{SY_{12}} \times 100 - 100$	$\frac{SY_{14}}{SY_{13}} \times 100 - 100$

e. Indeks Harga Implisit

Tabel turunan ini diperoleh dengan cara membagi masing-masing angka dalam Tabel 1 dengan angka sejenis dalam Tabel 2, atau angka nominal atas dasar harga berlaku dibagi dengan angka atas dasar harga konstan, dikalikan dengan 100.

Indeks ini menunjukkan tingkat inflasi untuk masing-masing subsektor/sector ataupun PDRB, setiap tahun. Pertumbuhan indeks harga implisit tersebut merupakan inflasi harga produsen tiap subsektor/sector/PDRB tahun yang bersangkutan. Pada tahun dasar, indeks semua subsektor/sector/PDRB akan sama dengan 100,00. Tabel disajikan dalam bentuk sebagai berikut:

**TABEL 8. INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA ...
MENURUT LAPANGAN USAHA,
TAHUN 2004 – 2007**

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PERTANIAN	100	$\frac{X_{12}}{Y_{12}} \times 100\%$	$\frac{X_{13}}{Y_{13}} \times 100\%$	$\frac{X_{14}}{Y_{14}} \times 100\%$
a. Tanaman Bahan Makanan				
b. ...				
c. dst.				
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	100			
.				
.				
.				
9. JASA-JASA	100			
a. ...				
b. ...				
c. ...				
PDRB	100	$\frac{SX_{12}}{SY_{12}} \times 100\%$	$\frac{SX_{13}}{SY_{13}} \times 100\%$	$\frac{SX_{14}}{SY_{14}} \times 100\%$

*) Tahun Dasar

BAB VI

ANALISA DAN KEGUNAAN DATA PDRB

6.1. Arti Analisa Data

Analisa data pada dasarnya dapat diartikan sebagai penjabaran atas pengukuran data kuantitatif menjadi suatu bentuk penyajian yang lebih mudah untuk ditafsirkan. Pada dasarnya analisa dapat diartikan sebagai:

- (a) Menguraikan suatu masalah baik secara keseluruhan (general) atau secara sebagian (parsial)
- (b) Memperhitungkan besarnya pengaruh perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya.

Dalam kaitannya dengan perhitungan PDRB, maka analisa dapat dilakukan dengan menurunkan parameter yang merupakan beberapa indikator ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, tingkat inflasi dan sebagainya. Parameter-parameter tersebut dapat diturunkan melalui tabel agregasi PDRB yang berupa nilai nominal. Untuk memperoleh informasi mengenai parameter yang akan dianalisa dapat digunakan metode statistik seperti rasio (persentase), indeks perkembangan dan indeks berantai. Tersedianya tabel PDRB secara regular akan memudahkan dalam melakukan analisa.

Tabel merupakan suatu metode statistik untuk menyajikan data secara komprehensif. Tabel yang merupakan sumber informasi perlu diuraikan untuk melakukan analisa yang lebih spesifik. Dengan demikian, dalam menganalisa data PDRB akan disajikan tabel dan grafik statistik yang dilengkapi dengan ulasanya. Penyajian tersebut akan memudahkan pembaca melakukan evaluasi terhadap data PDRB.

6.2. Tujuan Analisa

Tujuan utama dari analisa ini adalah untuk menjabarkan hasil penghitungan PDRB kedalam bentuk yang relatif sederhana, dengan menggunakan pendekatan metode statistik deskriptif. Untuk itu penyajian tabel pokok PDRB perlu dilengkapi dengan penyajian grafik statistik. Penyajian grafik tersebut akan lebih memudahkan pembaca dalam melakukan analisa secara visual. Selain dari tujuan diatas, analisa data PDRB juga bertujuan untuk:

- (1) Mempelajari pola perekonomian daerah.
- (2) Menguraikan pengaruh dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya dalam suatu daerah dan waktu yang sama.
- (3) Melakukan perbandingan antar komponen dan kepentingan relatifnya.
- (4) Dasar evaluasi hasil pembangunan serta menentukan penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

Dengan demikian untuk menunjang analisa tersebut dapat digunakan metode statistik yang relatif cukup sederhana, seperti penyajian tabel dan grafik.

6.3. Metode Statistik yang Digunakan

Untuk melakukan analisa tersebut digunakan metode statistik deskriptif, seperti penyusunan rasio-rasio, angka indeks, rata-rata dan lain sebagainya. Dengan demikian tabel nominal PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan perlu diturunkan menjadi tabel-tabel pokok analisa dengan menggunakan metode statistik seperti yang dijelaskan diatas.

Setelah tabel tersebut tersedia maka penyajian data PDRB dapat dilengkapi dengan penyajian grafik statistik. Penyajian dengan grafik akan memudahkan pemakai data melakukan analisa secara visual. Jenis grafik yang dapat digunakan disini antara lain meliputi diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran.

6.4. Ringkasan Data PDRB

Data PDRB disajikan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran.

a. Penghitungan PDRB dari Sudut Sektoral

Penghitungan ini menunjukkan besarnya kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah, sebagai akibat dari adanya proses produksi. Nilai tambah yang terbentuk dari setiap sektor ekonomi tersebut menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah. Nilai tambah ini merupakan indikator ekonomi makro yang akan dianalisa menggunakan pendekatan metode statistik.

b. Penghitungan PDRB dari Sudut Penggunaan

Penghitungan ini menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir, baik yang berasal dari produksi domestik atau produksi yang berasal dari daerah lain. Pada dasarnya PDRB yang diperoleh dari sektoral diatas direfleksikan dalam penggunaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi.

6.5. Teknik Analisa

Cara menganalisa jika dikaitkan dengan waktu dapat dibagi menjadi dua:

a. Analisa Titik (Cross Section)

Dalam hal ini, analisa yang dilakukan terhadap PDRB adalah analisa data pada tahun tertentu saja. Analisa ini berguna untuk melihat keadaan data di suatu daerah pada saat tertentu. Dengan demikian pada analisa ini, rasio sangat tepat dipakai. Jenis analisa PDRB Kabupaten/Kota meliputi:

- Analisa antar kabupaten dalam suatu Provinsi pada tahun tertentu;
- Analisa antar parameter dari PDRB Kabupaten/Kota tertentu pada tahun tertentu.

b. Analisa Deret Berkala (Time Series)

Analisa ini menyangkut penelitian data dari waktu ke waktu. Dalam hal data PDRB, analisa deret berkala ini sangat berguna untuk melihat hubungan dan perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Data PDRB yang disusun secara berkala dari waktu ke waktu merupakan data periodik atau data titik. Sebagai bahan dasar analisa, data tersebut harus sebanding. Apabila data deret berkala ini tersedia dalam waktu yang cukup panjang, maka data tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan ramalan.

Analisa time series untuk PDRB Kabupaten/Kota meliputi:

- Analisa total PDRB dan sektoral untuk Kabupaten/Kota dalam suatu periode (beberapa tahun);
- Analisa parameter dari PDRB kabupaten dalam suatu periode;
- Rasio dan perbandingan angka-angka kabupaten terhadap angka Provinsi.

Yang dimaksud parameter disini mencakup:

- a. Distribusi persentase masing-masing sektor;
- b. Indeks berantai;
- c. Laju pertumbuhan per sektor;
- d. Indeks perkembangan;
- e. Indeks implisit;
- f. PDRB perkapita.

Analisa yang dapat dilakukan oleh BPS Provinsi:

- Analisa antar kabupaten menurut parameter (sesuai tabel turunan) pada tahun tertentu (cross section). Lihat Tabel 1.1 (Lampiran A).
- Analisa parameter sektoral menurut kabupaten dalam suatu periode (time series). Lihat Tabel 1.2 (Lampiran B)
- Analisa rasio/perbandingan angka-angka Kabupaten/Kota terhadap angka total Provinsi dalam suatu periode. Lihat Tabel 1.3 (Lampiran C).
- Analisa kombinasi beberapa parameter (misalnya laju pertumbuhan dan PDRB perkapita) antar kabupaten terhadap Provinsi. Lihat Tabel 1.4 (Lampiran D).

Analisa yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota:

- Analisa deskriptif dari setiap parameter berdasarkan tabel turunan (secara time series). Lihat Tabel 2.1 (Lampiran E).
- Rasio nilai tambah masing-masing sektor di kabupaten/kota terhadap nilai tambah masing-masing sektor di Provinsi pada tahun tertentu. Lihat Tabel 2.2 (Lampiran F).

6.6. Beberapa Indikator Pokok Ekonomi Makro

6.6.a. PDRB Sektoral

a. Nilai Nominal PDRB

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung

pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah. Dari sini dapat dilihat besaran nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi. Selain itu dapat dilihat sektor-sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah.

b. Peranan/Kontribusi Sektor Ekonomi

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Misalnya adanya penurunan peran sektor pertanian diikuti dengan kenaikan sektor industri.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala.

d. Tingkat Perubahan Harga (Inflasi/Deflasi)

Inflasi/deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan dengan pendapatan. Indeks harga ini dapat diturunkan juga dari perhitungan PDRB yang disebut sebagai "PDRB deflator" atau yang dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), indeks implisit menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen dan harga yang dicakup dalam indeks ini relatif lebih lengkap. Indeks implisit PDRB menggambarkan perkembangan perubahan harga. Untuk kepentingan analisa, indeks implisit lebih sesuai jika disajikan dalam bentuk indeks perkembangan karena menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu.

e. PDRB/PDRN Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB/PDRN dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

6.6.b. PDRB Penggunaan

Penyajian PDRB menurut komponen penggunaan (pengeluaran) menunjukkan alokasi penggunaan produk barang dan jasa oleh konsumen akhir. Berbagai analisa dapat diturunkan dari penyajian ini, misalnya hubungan antara pendapatan dan konsumsi, tabungan, pembentukan modal dan perubahan stok serta ekspor dan impor.

a. Nilai Nominal

PDRB menurut komponen penggunaan diartikan sebagai gambaran dari produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir. Pendekatan ini lebih ditekankan pada penyediaan produk barang dan jasa untuk konsumsi akhir. Dengan demikian nilai PDRB disini menunjukkan besarnya penggunaan barang dan jasa untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal dan perubahan stok serta ekspor dan impor.

b. Peranan/Kontribusi Komponen Penggunaan

Peranan masing-masing komponen penggunaan yang dinyatakan dalam rasio/persentase menunjukkan besarnya komponen penggunaan akhir PDRB. Peran yang ditunjukkan dalam prosentase tersebut menggambarkan bagian dari PDRB yang digunakan untuk konsumsi akhir, seperti konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, ekspor dan impor. Komponen tersebut dapat pula diartikan sebagai bagian barang dan jasa yang tidak digunakan sebagai biaya antara di sektor produksi. Dari komponen tersebut dapat dipelajari analisa secara parsial misalkan produk barang yang tidak dapat didistribusikan seperti perubahan stok dan analisa mengenai defisit atau surplusnya suatu daerah (ekspor neto).

c. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Penggunaan

Laju pertumbuhan ekonomi ini diturunkan dari hasil perhitungan PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan. Indikator ini menunjukkan adanya perubahan kuantum dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal dan ekspor dan impor. Dari penyajian ini dapat ditunjukkan berapa persen kenaikan pembentukan modal dan kenaikan ekspor serta impor.

6.7. Kegunaan Data PDRB

Data PDRB dapat dipergunakan untuk mengetahui berbagai kebutuhan, antara lain :

a. Pertumbuhan Ekonomi, Baik Regional Maupun Sektoral.

Untuk menghitung rata-rata laju pertumbuhan (rate of growth) PDRB dalam suatu periode (n tahun) dapat dipakai formula:

$$g = \frac{\Sigma([\frac{\Sigma Y_{it}}{\Sigma Y_{it-1}} * 100\%] - 100\%)}{n - 1}$$

dimana :
g = Rata-rata laju pertumbuhan
 Y_{it} = PDRB tahun ke - t
 $Y_{i,t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya
n = jumlah tahun dalam satu periode

b. Tingkat Kemakmuran Penduduk Suatu Daerah

Tinggi rendahnya tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan perkapita yang diperoleh dari pembagian antara Pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

c. Perubahan Harga Barang Secara Keseluruhan

Pendapatan regional pada dasarnya merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu daerah dalam waktu (tahun) tertentu. Pendapatan Regional ini biasanya dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Perbandingan antara pendapatan regional atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan merupakan angka indeks implisit yang dapat dipergunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Secara sederhana indeks implisit ini dapat dihitung dengan formula:

$$I_t = \frac{X_{it}}{Y_{it}} * 100\%$$

dimana :
 I_t = Indeks Implisit
 X_{it} = PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun ke - t
 Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan pada tahun ke - t

Perubahan harga produsen barang dan jasa diperoleh berdasarkan pertumbuhan indeks implisit yang dapat dihitung dengan formula:

$$\Delta I_t = (\frac{I_t}{I_{t-1}} * 100\%) - 100\%$$

dimana :

ΔI_t = Perubahan harga produsen tahun ke - t terhadap tahun sebelumnya
 I_{t-1} = Indeks implisit tahun sebelumnya

d. Struktur Perekonomian dan Perubahannya

Pendapatan regional biasanya disajikan menurut sektor kemudian nilai tambah masing-masing sektor dibandingkan dengan pendapatan regional yang merupakan jumlah dan dinyatakan dalam persentase. Dengan melihat angka persentase setiap sektor tersebut, selain dapat diketahui sumbangan atau kontribusi masing-masing sektor, sekaligus juga dapat dilihat struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diketahui apakah perekonomian daerah bersifat agraris atau non agraris. Apabila pendapatan regional dikumpulkan dari waktu ke waktu, maka akan terlihat perubahan kontribusi masing-masing sektor serta perubahan struktur ekonominya.

e. Elastisitas Kesempatan Kerja Dengan Bantuan Employment Data

Apabila data pendapatan regional dan data employment disajikan bersama-sama secara series dari waktu ke waktu, maka dapat dihitung angka elastisitas kesempatan kerja terhadap pendapatan regional. Elastisitas kesempatan kerja ini mencerminkan pengaruh kenaikan/penurunan pendapatan regional terhadap kesempatan kerja. Perlu ditekankan disini bahwa kenaikan pendapatan regional bukan saja disebabkan oleh adanya kesempatan kerja yang bertambah tetapi juga disebabkan adanya penambahan modal. Pengaruh dari dua faktor ini sangat sulit dipisahkan.

f. Produktivitas per Sektoral

Apabila data mengenai tenaga kerja dapat disajikan secara sektoral, maka produktivitas per sektor dapat dihitung. Cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah nilai tambah dari sektor yang bersangkutan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Produktivitas tenaga kerja sektoral ini sangat berguna untuk mempertimbangkan penentuan alokasi tenaga kerja secara sektoral.

g. Berbagai Macam Rasio

Rasio merupakan salah satu bentuk metode statistik yang paling sederhana yang umumnya digunakan untuk melakukan perbandingan. Pada umumnya rasio ini dinyatakan dalam bentuk persentase yang menunjukkan perbandingan:

- (a) Data yang berbeda dalam satu waktu.
- (b) Data yang sejenis pada tahun yang berbeda tetapi pada tempat yang sama.
- (c) Data yang sejenis pada tahun yang sama tetapi pada tempat berbeda.

Rasio ini diperoleh dengan cara membagi suatu nilai terhadap nilai lainnya. Rasio-rasio yang sangat bermanfaat sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan pembangunan daerah ini dapat diturunkan dari pendapatan regional. Misalnya rasio antara penerimaan pajak dengan pendapatan regional, rasio biaya pendidikan dengan pendapatan regional dan lain sebagainya.

<http://www.bps.go.id>

BAB VII

KETERBATASAN DAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PENGHITUNGAN

Keterbatasan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam penghitungan PDRB sebagai indikator ekonomi makro yang merupakan rangkuman dari berbagai unsur dan komponen statistik ekonomi, perlu dipahami oleh para konsumen data agar dapat menafsirkan dan mengambil kesimpulan secara tepat dalam menggunakan PDRB untuk berbagai keperluan analisis, evaluasi dan penyusunan perencanaan pembangunan.

7.1. Keterbatasan

PDRB atau Pendapatan Regional merupakan perangkat pokok dalam Neraca Ekonomi Regional. Neraca Ekonomi Regional pada umumnya berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi yang dapat diukur atau dinilai dalam bentuk uang. Penilaian ini dalam kenyataan adalah transaksi barang dan jasa antara penjual dengan pembeli melalui suatu mekanisme pasar. Barang dan jasa yang tidak melalui transaksi jual beli (pasar) dilakukan penilaian tersendiri, misalnya menempati rumah sendiri dalam hal ini dianggap menyewa rumah sendiri (imputasi nilai sewa). Tetapi tidak semua barang dan jasa yang merupakan hasil kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dimasukkan ke dalam Neraca Ekonomi. Begitu juga beberapa masalah konsep dan klasifikasi dari Neraca Ekonomi Regional tidak sesuai dengan kenyataan yang dilakukan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan yang tidak dicakup, dan konsep-konsep serta klasifikasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi sehari-hari adalah sebagai berikut:

a. Jasa yang tidak dapat dinilai

Jasa ini misalnya jasa seorang isteri dalam memberikan pelayanan dalam rumahtangga, jasa pelayanan seorang teman pada teman lainnya, dan jasa lain yang dilakukan tanpa perhitungan materi atau tanpa pamrih.

b. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan illegal

Kegiatan ini misalnya penyelundupan, prostitusi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang secara hukum negara maupun adat tidak diperkenankan dilakukan.

c. Konsep pembelian oleh rumahtangga terhadap barang-barang yang sifatnya tahan lama.

Di dalam kenyataannya beberapa barang tahan lama yang dibeli rumahtangga tidak habis digunakan dalam satu periode (1 tahun), misalnya mobil, pompa air, perabot rumahtangga dan lain-lain, sehingga seharusnya merupakan barang-barang modal untuk rumahtangga. Tetapi dalam konsep neraca ekonomi pembelian barang-barang semacam ini khusus oleh rumahtangga dianggap sebagai barang konsumsi, bukan sebagai barang modal. Kecuali rumahtinggal dianggap sebagai barang modal.

d. Konsep pengeluaran untuk pendidikan

Apabila konsep pengeluaran dihubungkan dengan konsep pembentukan modal, maka konsep pengeluaran pendidikan seharusnya dimasukkan ke dalam pembentukan modal, oleh karena hasil dari pengeluaran pendidikan pada umumnya akan dinikmati atau akan diperoleh pada beberapa periode yang akan datang. Dalam neraca ekonomi, pengeluaran untuk pendidikan baik itu penyelenggaraannya kurang dari satu tahun maupun lebih dari satu tahun dimasukkan sebagai biaya (current cost), dan pembebanan biayanya sesuai dengan kapan biaya-biaya pendidikan itu dikeluarkan.

e. Anggapan tabungan sama dengan investasi.

Di dalam teori pendapatan nasional/regional yang sederhana dijumpai anggapan yang menyatakan bahwa, secara agregasi pendapatan akan sama dengan konsumsi ditambah investasi, tabungan akan sama dengan investasi di dalam suatu periode yang sama. Kenyataannya dalam suatu periode, jumlah pendapatan tidak sama dengan konsumsi ditambah investasi, karena mungkin konsumsi pada periode tersebut berasal dari pendapatan periode sebelumnya. Hal yang sama untuk tabungan pada suatu periode tidak sama dengan besarnya investasi pada periode tersebut. Investasi pada periode itu mungkin berasal dari tabungan-tabungan pada masa yang lalu, dan tabungan-tabungan pada periode sekarang mungkin diinvestasikan pada periode yang akan datang.

7.2. Masalah yang Dihadapi Dalam Penghitungan.

Persoalan pokok yang dihadapi adalah bagaimana memperkirakan secara tepat pendapatan suatu daerah, agar dapat mencerminkan keadaan perekonomian yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan oleh para pembuat keputusan dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun pada tingkat regional. Sudah barang tentu bahwa baik konsep, definisi dan ruang lingkup, maupun metode estimasi untuk penghitungan pendapatan nasional tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada tingkat regional. Penyesuaian (adjustment) perlu dilakukan terlebih dahulu untuk itu, karena masih banyak masalah yang harus dihadapi.

Masalah-masalah tersebut secara garis besarnya meliputi persoalan konsep dan persoalan teknis penghitungan:

7.2.1. Persoalan Konsep

Persoalan konsep sehubungan dengan data, kelembagaan (institutional) dan kebijaksanaan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Masalah Data

1. Sumber data baik hasil sensus maupun dari catatan administrasi berbagai instansi/lembaga di tingkat pusat biasanya tersedia untuk lingkup nasional. Disagregasi data secara nasional menjadi regional kadang-kadang terbentur kepada masalah-masalah teknis penyajian/kerahasiaan data statistik terutama untuk tingkat daerah yang kecil.

2. Kalau data secara nasional diperoleh dari hasil sample survey atau proyeksi, maka data tersebut hanya dapat digunakan secara nasional, adalah tidak tepat kalau diperinci atau dialokasi ke daerah-daerah berdasarkan sample yang ada karena rencana sampling belum tentu dibuat untuk memenuhi kepentingan perincian per daerah.
3. Pada tingkat nasional data tentang produksi dapat diperkirakan melalui penyediaan maupun penggunaannya, hal ini dapat juga diterapkan untuk tingkat daerah dengan asumsi perekonomian tertutup. Namun dalam kenyataan banyak dijumpai masalah mobilitas tempat kerja dan tempat tinggal yang berbeda, sehingga jumlah permintaan atau penyediaan barang dan jasa sulit untuk dipakai memperkirakan produksi suatu daerah.

b. Masalah Kelembagaan

1. Kegiatan yang menimbulkan pendapatan dan dilakukan oleh berbagai lembaga/badan atau sektor dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, namun dapat pula mengelompok di beberapa pulau atau Provinsi saja. Untuk menghitung pendapatan regional, bagi perusahaan/badan yang multi regional perlu penegasan secara konsep apakah dialokir secara nasional atau dibagi menurut lokasi tempat satuan usaha (establishment) atau menurut lingkup usahanya.
2. Jika meneliti mengenai andilnya faktor produksi, terdapat perbedaan antara balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dengan produk originated di daerah tersebut. Produk originated untuk perusahaan multi region atau supraregional masih perlu penyesuaian dengan konsep yang dipakai.
3. Masalah transaksi luar negeri/luar daerah akan bertambah jika daerah atau wilayah yang diselidiki secara geografis makin kecil, karena ada lembaga/badan yang menyajikan data statistik secara reguler dan lengkap mengenai transaksi-transaksi antar daerah.

c. Masalah Kebijakan

Pada penghitungan pendapatan nasional, transaksi luar negeri dapat diketahui dengan pasti dan dibedakan dari transaksi domestik, sehingga pengaruhnya terhadap perekonomian secara keseluruhan dapat diperhitungkan. Demikian pula halnya mengenai kebijakan pemerintah dapat dibedakan dengan jelas mana yang ditujukan ke dalam negeri (domestik) dan mana yang ditujukan kepada hubungan internasional, sehingga dapat dianalisa secara eksplisit.

Dalam hal pendapatan regional dari daerah yang pada umumnya bersifat ekonomi terbuka, akan sulit membedakan kebijakan pemerintah secara terpisah, yang bersifat domestik dan yang bersifat antar daerah (luar negeri).

7.2.2. Persoalan Teknis Perhitungan

a. Masalah Penilaian

Pendapatan Nasional atau Regional adalah nilai neto produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara atau daerah tersebut. Untuk itu perlu metode-metode penilaian yang akan dipakai untuk menilai produksi barang dan jasa neto, teristimewa untuk menilai barang dan jasa yang tidak ada nilai transaksinya atau pasarnya.

b. Masalah Kelengkapan Data

Sering data yang digunakan tidak lengkap, sehingga diperlukan suatu cara tertentu untuk memperkirakan data tersebut agar secara relatif bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal-hal yang lain bahwa data yang tersedia mungkin tidak konsisten satu sama lainnya, dan untuk itu cukup sulit untuk menentukan data yang dianggap benar.

c. Masalah Penyediaan

Salah satu masalah yang paling sulit dihadapi adalah tidak tersedianya data pada saat penyusunan perhitungan pendapatan nasional atau regional. Hal ini mendorong dilakukannya estimasi-estimasi data yang dipakai sehingga hasil-hasil penghitungan pendapatan nasional atau regional semakin lemah ketepatannya.

d. Masalah Batasan yang Tidak Jelas Dalam Suatu Kegiatan

Pada dasarnya ada tiga kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu kegiatan yang menghasilkan, kegiatan mengkonsumsi dan menginvestasi. Di dalam kenyataannya ada kegiatan yang sulit untuk ditentukan apakah kegiatan tersebut kegiatan yang mengkonsumsi, atau digolongkan di dalam salah satu kategori di atas. Dalam hal ini harus ada suatu cara dasar penggolongan tertentu yang dipakai dalam kegiatan-kegiatan ini.

e. Masalah Klasifikasi Dalam Perhitungan

Penyusunan angka-angka pendapatan nasional maupun regional dihitung menurut sektor-sektor ekonomi yang mengikuti standar klasifikasi internasional. Untuk menerapkan klasifikasi ini sesuai dengan standar yang telah ditentukan tidak selalu mudah, karena pada umumnya masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi sekaligus sehingga sulit dipisahkannya menurut klasifikasi sektoral. Berdasarkan berbagai pertimbangan (waktu, biaya dan teknis perhitungan) maka masalah-masalah yang didapatkan di dalam perhitungan dibuatkan berbagai konsensus, yang dapat dipakai dalam setiap perhitungan pendapatan nasional atau regional. Konsensus ini tentu saja dapat dirubah sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah-daerah pada waktu itu.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang didapatkan dalam perhitungan pendapatan nasional atau regional, memungkinkan para produsen dapat menyiapkan data sebaik-baiknya dan para konsumen data akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu kebijaksanaan.

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- ABRAHAM, W.I., **National Income and Economic Accounting**, Prentice Hall Inc., Englewood Cliff, New Jersey, 1969
- DAYAN, ANTO, **Pengantar Metode Statistik I**, LP3ES, Jakarta, 1975
- , **Pengantar Metode Statistik II**, LP3ES, Jakarta, 1975
- BAPPEDA TINGKAT I BENGKULU, **Pendapatan Regional Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1971-1975**, Bengkulu, 1977
- BADAN PUSAT STATISTIK, **Pendapatan Nasional Indonesia 1986-1991**, Jakarta, 1992
- , **Pedoman Penghitungan Pendapatan Regional di Indonesia**, Jakarta, 1980
- , **Pendapatan Regional Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1983-1990**, Jakarta, 1992
- , **Pendapatan Regional Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Penggunaan Tahun 1983-1990**, Jakarta, 1992
- , **Social Accounting Matrix Indonesia, 1985, Volume I**, Jakarta, 1991
- DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI, **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982; Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D)**
- GLASSBURNER, B., CHANDRA, A., **Teori dan Kebijakan Makro Ekonomi (Catatan dan Latihan)**, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1975
- GLASSON, JOHN, **An Introduction to Regional Planning**, (Diterjemahkan Oleh Paul Sitohang), Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1977
- HADIBROTO, dkk., **Dasar-dasar Akuntansi**, LP3ES, Jakarta, 1978
- ESMARA, HENDRA, MAKMUR & AZHAR, **Pendapatan Regional Sumatera Barat 1966-1976**, LPER-FE, Universitas Andalas, Padang, 1978

- HIDAYAT, dkk., **Perhitungan Pendapatan Regional Jawa Barat 1973, 1974, 1975**, Kerjasama: BAPPEDA Tingkat I Jawa Barat dan Pusat Penelitian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, FE Universitas Padjadjaran, Bandung 1976
- HOCHWALD, W., **Conceptual Issues of Regional Income Estimation, Studies in Income and Wealth Vol. XXI**, Princeton University Press, Princeton, 1957
- , **Design of Regional Accounts**, The John Hopkins Press, Baltimore, 1969
- VAN HEEMST, JAN JP, **National Accounting: Concepts and Practices with Special Reference to Indonesia Regional Accounting**, Jakarta, Juli 1990
- KENDRICK, JW, **Economic Accounting and Their Uses**, McGraw-Hill Book Company, New York, 1970
- KERR, ALEX, **State and Regional Estimation**, University of Western Press, 1963
- KHAN, TAUFIQ M., **Economic Accounting Statistics; (Lecture Notes), Part I & II**, Asian Institute, Tokyo, August, 1973
- RASJID, MUCHRAN, **Pendapatan Regional Provinsi Kalimantan Selatan 1975-1978**, Kerjasama: KPR, BAPPEDA, KSS Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1980
- PARTADIREDDJA, ACE, **Perhitungan Pendapatan Nasional; Pengantar ke Analisa Ekonomi Makro**, LP3ES, Jakarta, 1977
- RICHARDSON, HARRY W., (Diterjemahkan Paul Sitohang), **Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional**, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1977
- , **Elements of Regional Economic**, (Diterjemahkan Oleh Paul Sitohang), Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1977
- RISYAD, T., dkk., **Perkiraan Pendapatan Regional Daerah Istimewa Aceh 1969**, LPE & SFE Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1978
- RUGGLES, N., AND RUGGLES, R., **The Design of Economic Accounts**, N.B.E.R., New York, 1970
- SOEDIYONO, R., **Ekonomi Makro; Pengantar Analisa Pendapatan Nasional**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979
- SOURROUILLE, J.V., **Regional Accounts; Theoretical and Practical Problems Encountered in the Recent Experience of Argentina**, The Review of Income and Wealth, Series: 22 Number: 1, March 1977

TEAM PENELITI PERHITUNGAN PENDAPATAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Perhitungan Pendapatan Regional Provinsi Sulawesi Selatan, 1969-1973,
LPEM-Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1974

UNITED NATIONS, **A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No. 2**
Rev. 3, Statistical Office of The United Nations, New York, 1968

-----, **Handbook on National Accounting Part I (Provisional),**
Statistical Office of The United Nations, May 1975

-----, **Manual on National Accounts at Constant Prices,** Statistical
Paper Series M, No. 64, New York, 1979

-----, **National Accounting Data in Constant Prices,** United Nations
Economic and Social Council, 26 October 1966

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Lampiran A

1.1.*) adh..... menurut sektor dan Kabupaten/Kota,
di Provinsitahun....

Kabupaten/Kota*)									PDRB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
Rata-rata Kabupaten/Kota										
Provinsi										

- *) - Distribusi persentase
 - Indeks berantai
 - Laju pertumbuhan
 - Indeks implisit
 - PDRB per kapita

1.1.a. Distribusi persentase adh. per sektor
menurut Kabupaten/Kota di Provinsitahun....

Kabupaten	Distribusi Persentase									PDRB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
Rata-rata Kabupaten/Kota										
Provinsi										

1.1.b. Indeks Berantai adh. menurut sektor dan Kabupaten/Kota di Provinsitahun....

Kabupaten/Kota	Indeks Berantai									PDRB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
Rata-rata Kabupaten/Kota										
Provinsi										

1.1.c. Laju pertumbuhan adh. menurut sektor dan Kabupaten/Kota di Provinsitahun....

Kabupaten/Kota	Laju pertumbuhan									PDRB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
Rata-rata Kabupaten/Kota										
Provinsi										

1.1.d. Indeks Implisit menurut sektor dan Kabupaten/Kota
di Provinsitahun....

Kabupaten/Kota	Indeks Implisit									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PDRB
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
Rata-rata Kabupaten/Kota Provinsi										

Lampiran B

1.2.*) adh.....
 sektor.....subsektor.....
 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
 tahun -

Kabupaten/Kota	Tahun											

1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Rata-rata Kabupaten/Kota												
Provinsi												

- *) - Distribusi persentase
 - Indeks berantai
 - Laju pertumbuhan
 - Indeks implisit
 - PDRB per kapita

1.2.a. Distribusi Persentase adh.
 sektor.....subsektor.....menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsitahun -

Kabupaten/Kota	Tahun											

1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Rata-rata Kabupaten/Kota												
Provinsi												

1.2.b. Indeks Berantai adh.
 Sektor.....subsektor.....menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi tahun -

Kabupaten/Kota	Tahun											
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Rata-rata Kabupaten/Kota												
Provinsi												

1.2.c. Laju Pertumbuhan Sektor.....subsektor.....
 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
 tahun -

Kabupaten/Kota	Tahun											
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Rata-rata Kabupaten/Kota												
Provinsi												

1.2.d. Indeks Implisit Sektor.....subsektor.....
 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
 tahun -

Kabupaten/Kota	Tahun											

1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Rata-rata Kabupaten/Kota												
Provinsi												

1.2.e. PDRB per kapita adh. menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi tahun -

Kabupaten/Kota	Tahun											

1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Rata-rata Kabupaten/Kota												
Provinsi												

Lampiran C

1.3.**) adh. Kabupaten/Kota
terhadap Provinsi..... , tahun ...-...

Kabupaten/Kota	Tahun **)											

1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Total/ Rata-rata Kabupaten/Kota												
Provinsi												

**) a. Ratio nilai tambah bruto sektor.....subsektor.....

- Perbandingan distribusi persentase (peranan masing-masing sektor)
- b. Perbandingan indeks berantai
- c. Perbandingan laju pertumbuhan
- d. Perbandingan indeks perkembangan
- e. Perbandingan indeks implisit
- f. Perbandingan PDRB per kapita.

1.3.a. Rasio nilai tambah bruto sektor adh.
Kabupaten/Kota terhadap Provinsi..... , tahun

Kabupaten/Kota	Tahun									

1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
Total/ Rata-rata Kabupaten/Kota										
Provinsi										

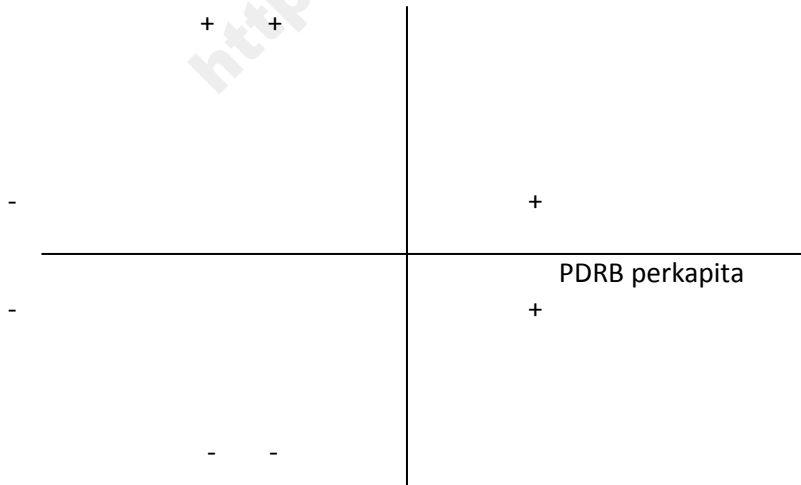
Lampiran D

1.4. Perbandingan PDRB per kapita adh. berlaku dan laju pertumbuhan adh. konstan 19.. menurut Kabupaten/Kota di Provinsitahun....

Kabupaten/Kota	PDRB per kapita (.....)	Laju pertumbuhan PDRB (%)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
Rata-rata Kabupaten/ Kota Provinsi		

Perbandingan laju pertumbuhan dan PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota dan Provinsi, berdasarkan tabel 1.4.

laju pertumbuhan(%)



1.4a. Perbandingan Nilai Tambah Sektor ... adh. berlaku dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor ... menurut Kabupaten/Kota di Provinsitahun....

Kabupaten/Kota	PDRB per kapita (.....)	Laju pertumbuhan PDRB (%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.		
Rata-rata Kabupaten Provinsi		

<http://www.bps.go.id>

Lampiran E

2.1**) adh.
di Kabupaten/Kota..... Provinsi....., tahun....

Sektor/Subsektor	Tahun										

1.Pertanian 1.1. 1.2.											
2.Pertambangan & penggalian 2.1. 2.2.											
9.Jasa-jasa a. b. 1. 2. 3.											
P D R B											

- **) a. Distribusi Persentase
b. Indeks Berantai
c. Laju Pertumbuhan
d. Indeks Perkembangan
e. Indeks Implisit
f. PDRB per kapita

Lampiran F

2.2. Rasio Nilai Tambah Bruto menurut lapangan usaha adh.....
di Kabupaten/Kota.....Provinsi....., tahun....

Sektor/ subsektor	Kabupaten/Kota									Propinsi
	
1.Pertanian										100.00
1.1.										
1.2.										
1.3.										
1.4.										
1.5.										
1.6.										
2.Pertam- bangan & penggalian										100.00
2.1.										
2.2.										
3.Industri										100.00
3.1.										
3.2.										
3.3.										
3.4.										
9.Jasa-jasa a.										
b.										
1.										
2.										
3.										
P D R B										100.00

Berdasarkan tabel 1.3. yang dibuat oleh BPS Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- ABRAHAM, W.I., **National Income and Economic Accounting**, Prentice Hall Inc., Englewood Cliff, New Jersey, 1969
- DAYAN, ANTO, **Pengantar Metode Statistik I**, LP3ES, Jakarta, 1975
- , **Pengantar Metode Statistik II**, LP3ES, Jakarta, 1975
- BAPPEDA TINGKAT I BENGKULU, **Pendapatan Regional Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1971-1975**, Bengkulu, 1977
- BADAN PUSAT STATISTIK, **Pendapatan Nasional Indonesia 1986-1991**, Jakarta, 1992
- , **Pedoman Penghitungan Pendapatan Regional di Indonesia**, Jakarta, 1980
- , **Pendapatan Regional Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1983-1990**, Jakarta, 1992
- , **Pendapatan Regional Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Penggunaan Tahun 1983-1990**, Jakarta, 1992
- , **Social Accounting Matrix Indonesia, 1985, Volume I**, Jakarta, 1991
- DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI, **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982; Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D)**
- GLASSBURNER, B., CHANDRA, A., **Teori dan Kebijakan Makro Ekonomi (Catatan dan Latihan)**, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1975
- GLASSON, JOHN, **An Introduction to Regional Planning**, (Diterjemahkan Oleh Paul Sitohang), Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1977
- HADIBROTO, dkk., **Dasar-dasar Akuntansi**, LP3ES, Jakarta, 1978
- ESMARA, HENDRA, MAKMUR & AZHAR, **Pendapatan Regional Sumatera Barat 1966-1976**, LPER-FE, Universitas Andalas, Padang, 1978

- HIDAYAT, dkk., **Perhitungan Pendapatan Regional Jawa Barat 1973, 1974, 1975**, Kerjasama: BAPPEDA Tingkat I Jawa Barat dan Pusat Penelitian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, FE Universitas Padjadjaran, Bandung 1976
- HOCHWALD, W., **Conceptual Issues of Regional Income Estimation, Studies in Income and Wealth Vol. XXI**, Princeton University Press, Princeton, 1957
- , **Design of Regional Accounts**, The John Hopkins Press, Baltimore, 1969
- VAN HEEMST, JAN JP, **National Accounting: Concepts and Practices with Special Reference to Indonesia Regional Accounting**, Jakarta, Juli 1990
- KENDRICK, JW, **Economic Accounting and Their Uses**, McGraw-Hill Book Company, New York, 1970
- KERR, ALEX, **State and Regional Estimation**, University of Western Press, 1963
- KHAN, TAUFIQ M., **Economic Accounting Statistics; (Lecture Notes), Part I & II**, Asian Institute, Tokyo, August, 1973
- RASJID, MUCHRAN, **Pendapatn Regional Provinsi Kalimantan Selatan 1975-1978**, Kerjasama: KPR, BAPPEDA, KSS Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1980
- PARTADIREDDJA, ACE, **Perhitungan Pendapatan Nasional; Pengantar ke Analisa Ekonomi Makro**, LP3ES, Jakarta, 1977
- RICHARDSON, HARRY W., (Diterjemahkan Paul Sitohang), **Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional**, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1977
- , **Elements of Regional Economic**, (Diterjemahkan Oleh Paul Sitohang), Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1977
- RISYAD, T., dkk., **Perkiraan Pendapatan Regional Daerah Istimewa Aceh 1969**, LPE & SFE Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1978
- RUGGLES, N., AND RUGGLES, R., **The Design of Economic Accounts**, N.B.E.R., New York, 1970
- SOEDIYONO, R., **Ekonomi Makro; Pengantar Analisa Pendapatan Nasional**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979

SOURROUILLE, J.V., **Regional Accounts; Theoretical and Practical Problems Encountered in the Recent Experience of Argentina**, The Review of Income and Wealth, Series: 22 Number: 1, March 1977

TEAM PENELITIAN PERHITUNGAN PENDAPATAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Perhitungan Pendapatan Regional Provinsi Sulawesi Selatan, 1969-1973,
LPEM-Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1974

UNITED NATIONS, **A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No. 2 Rev. 3**, Statistical Office of The United Nations, New York, 1968

-----, **Handbook on National Accounting Part I (Provisional)**,
Statistical Office of The United Nations, May 1975

-----, **Manual on National Accounts at Constant Prices**, Statistical
Paper Series M, No. 64, New York, 1979

-----, **National Accounting Data in Constant Prices**, United Nations
Economic and Social Council, 26 October 1966

<http://www.bps.go.id>